

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Kusumastuti, A. M. K. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (p. 160). Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Ahmad, A. A. (2018). Pembatasan Kampanye dan Rendahnya Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2015 di Tiga Kabupaten di Sulawesi Selatan Sulawesi. In *Jurnal Komunikasi KAREBA* (Vol. 6, Issue 1).
- Arifin, A. (2016). *Paradigma Baru Public Relations*. Pustaka Indonesia.
- Bafadhal, O. M., & Santoso, A. D. (2020). Memetakan Pesan Hoaks Berita Covid-19 Di Indonesia Lintas Kategori, Sumber, Dan Jenis Disinformasi. *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 6(02), 235. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v6i02.2148>
- Bungin, H. M. B. (2006). *Sosiologi Komunikasi.pdf*. Kencana Prenada Media Group.
- Bungin, H. M. B. (2011). Penelitian Kualitatif. In *Jakarta: Prenada Media Group* (Kedua). Kencana Prenada Media Group.
- Cangara, H. (2014). *Perencanaan dan Strategi Komunikasi* (Revisi). Rajawali Pers.
- Dr. Hary Budiarto, M. K. (2021). *TANTANGAN YANG DIHADAPI DALAM ERA REVOLUSI DIGITAL DAN NEW MEDIA*.
- Effendy, O. U. (2000). *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Fauzi, I. A., Rafsadia, I., Nursahid, A., Astuti, S. I., Kartika, D. A., Mulyartono, S., & Khairil, M. (2019). Buku Panduan Melawan Hasutan Kebencian. *Pusat Studi Agama Dan Demokrasi, Yayasan Paramadina Masyarakat Anti Fitnah Indonesia*, 1–62.
- Juditha, C. (2018). Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation (Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya). *Journal Pekommas*, 3(1), 31. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030104>
- Launa. (2020). Banjir infodemi: viralitas akurasi berita virologi dalam fenomena coronavirus disease. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 1–21.
- Luas, A. F., Sondakh, M., & Londa, J. W. (n.d.). *Strategi Komunikasi Pemerintah Dalam Menunjang Program Pengurangan Kemasan Plastik*

Pada Masyarakat Kelurahan Tosuraya Barat.

- M. Yusuf, P. (2010). *Komunikasi Instruksional*. Bumi Aksara.
- McQuail, D. (2010). *Teori Komunikasi Massa.pdf*. Penerbit Salemba.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Pub. L. No. Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 (2020).
- Morrison. (2008). *Manajemen Public Relations.pdf*. Kencana Prenada Media Group.
- Morrison. (2013). *Teori Komunikasi Individu Hingga Media Massa*.
- Mulyana, D. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif.pdf*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah, R. (2021). *Manajemen Komunikasi Digital Perencanaan, Aktivitas, dan Evaluasi*. Kencana Prenada Media Group.
- Pratiwi, A. (2012). *Strategi Komunikasi Direktorat Penyiaran Dalam Mengkomunikasikan Peraturan dan Kebijakan Proses Perizinan Penyiaran (Studi Evaluatif pada Kementerian Komunikasi dan Informatika)*. Universitas Indonesia.
- Pujileksono, S. (2016). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif* (p. 207). Kelompok Intrans Publishing.
- Rahayu et.al. (2019). Jurnalisme, ‘ “Berita Palsu”’, & Disinformasi Ambardi, K. (2019). Jurnalisme, ‘ “Berita Palsu”’, & Disinformasi. Disinformasi Tenaga Kerja Cina, 1–42. *Disinformasi Tenaga Kerja Cina*, 1–42.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (p. 287). Graha Ilmu.
- Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi COVID 19, Pub. L. No. SE Satgas Nomor 16 tahun 2021, 6 (2021).
- Stewart, Brent D. Ruben, L. P. (2013). *Komunikasi dan Perilaku Manusia* (p. 423). PT Rajagrafindo Persada.
- UNICEF. (2021). *Hoaks Membunuh Ayahku: Menyingkap pandemi lain di Indonesia Menemukan beragam cara untuk menangkal kabar-kabar bohong di media sosial dan aplikasi obrolan*.
https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus/cerita/hoaks-membunuh-ayahku-menyingkap-pandemi-lain-di-indonesia?gclid=CjwKCAjwlqOXBhBqEiwA-hhitPCGq1A3A0Ur3UMANtoyPKOI_mi8Znlv3RIM6qVMWhzQz7q-

8R11PhoCD84QAvD_BwE

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making. *Council of Europe Report*, 1–108.

Sumber Lain:

Jurnal

- Ahmad, A. A., Cangara, H., & Hasrullah, H. (2018). Pembatasan Kampanye dan Rendahnya Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2015 di Tiga Kabupaten di Sulawesi Selatan Sulawesi. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 6(1), 63–71.
- Bafadhal, O. M., & Santoso, A. D. (2020). Memetakan Pesan Hoaks Berita Covid-19 Di Indonesia Lintas Kategori, Sumber, Dan Jenis Disinformasi. *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 6(02), 235.
- Hary Budiarto, M. K. (2021). *TANTANGAN YANG DIHADAPI DALAM ERA REVOLUSI DIGITAL DAN NEW MEDIA* (Issue September).
- Juditha, C. (2018). Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation (Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya). *Journal Pekommas*, 3(1), 31. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030104>
- Launa. (2020). Banjir infodemi: viralitas akurasi berita virologi dalam fenomena coronavirus disease. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 1–21.
- Rahayu et.al. (2019). Jurnalisme, ‘ “Berita Palsu”’, & Disinformasi Ambardi, K. (2019). Jurnalisme, ‘ “Berita Palsu”’, & Disinformasi. *Disinformasi Tenaga Kerja Cina*, 1–42. *Disinformasi Tenaga Kerja Cina*, 1–42.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making. *Council of Europe Report*, 1–108.

Perundang-undangan :

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

SE Satgas Nomor 16 tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi COVID-19

Keputusan Bupati Bulukumba Tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid 19)

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Nomor 83/07-04/4.3/1/2021 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyuluhan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Penanganan Covid 19 dan Pelaksanaan Vaksinasi Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021.

Internet :

<https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>

<https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>

<https://covid19.go.id/peta-sebaran>

<https://www.liputan6.com/regional/read/4211963/antar-jenazah-anaknya-pasien-positif-corona-covid-19-di-makassar-kabur-dari-rumah-sakit>

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/1381/view/indonesia-dan-12-negara-lainnya-prakarsai-pernyataan-bersama-pbb-melawan-penyebaran-disinformasi>

<https://ketik.unpad.ac.id/posts/2866/waspadai-misinformasi-dan-disinformasi-opini-publik-terpengaruh>

<https://gaya.tempo.co/read/1408831/jangan-mudah-percaya-hoaks-soal-covid-19-ingat-dampak-buruknya>

LAMPIRAN

DRAFT WAWANCARA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
BULUKUMBA

- **PERAN DAN KEBIJAKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BULUKUMBA DALAM PENANGANAN COVID 19 DI KABUPATEN BULUKUMBA**

6. Apa peran dan kedudukan Diskominfo dalam penanganan Covid 19 di Kabupaten Bulukumba (regulasi dalam gugus tugas dan regulasi tentang tugas dan fungsi diskominfo)?
7. Terkait peran tersebut apakah Diskominfo melakukan riset terlebih dahulu untuk mengetahui masalah yang dihadapi terkait penanganan Covid 19?
8. Siapa saja pihak yang dilibatkan dalam penanganan Covid 19 di Kabupaten Bulukumba dikaitkan dengan peran Diskominfo?
9. Apakah Diskominfo menyusun sebuah perencanaan dan strategi dalam penanganan Covid 19 di Kabupaten Bulukumba sesuai dengan perannya, kalau ya, seperti apa dan untuk jangka waktu berapa lama?
10. Apakah ada anggaran khusus yang dialokasikan terkait penanganan Covid 19 di Kabupaten Bulukumba oleh Diskominfo, kalau ya bersumber darimana?
11. Apakah dari perencanaan tersebut dilakukan tahap evaluasi?

- **MISINFORMASI DAN DISINFORMASI COVID 19 DI KABUPATEN BULUKUMBA**

1. Apakah Diskominfo mengumpulkan informasi tentang Misinformasi dan Disinformasi tentang Covid 19 di Kabupaten Bulukumba?
2. Apa saja Disinformasi dan Misinformasi terkait Covid 19 yang ada di Kabupaten Bulukumba?
3. Darimana Misinformasi dan Disinformasi tersebut diperoleh?
4. Apakah Diskominfo memiliki tim cek fakta?
5. Apa langkah yang dilakukan Diskominfo setelah memperoleh informasi tentang Misinformasi dan Disinformasi tersebut?

- **STRATEGI KOMUNIKASI TERKAIT MISINFORMASI DAN DISINFORMASI COVID 19 DI KABUPATEN BULUKUMBA**

1. Siapa saja yang menjadi Komunikator dalam penyampaian informasi terkait upaya penanganan Misinformasi dan Disinformasi Covid 19 di Kabupaten Bulukumba
2. Siapa saja yang menjadi target sasaran atau khalayak informasi tersebut dengan mempertimbangkan :
 - Aspek sosiodemografik yakni mencakup usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, tingkat pendapatan, agama, ideology, etnis, termasuk pemilikan media;
 - Aspek profil psikologis, mencakup sikap yang tercermin dari kejiwaan masyarakat, misalnya temperamen, sabar, terbuka, dsb;
 - Aspek karakteristik perilaku masyarakat, mencakup kebiasaan-kebiasaan yang dijalani dalam kehidupan masyarakat. Misalnya agamais, santun, boros, suka menolong, solidaritas, dsb.
3. Siapa saja yang dilabtkan dalam proses penyusunan informasi?

4. Bagaimana proses penyusunan pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat?
5. Pesan apa saja yang disampaikan kepada masyarakat?
6. Apakah ada pesan-pesan khusus terkait misinformasi dan disinformasi Covid 19?
7. Bagaimana bentuk pesan yang disampaikan?
8. Media apa saja yang digunakan sebagai saluran informasi (media sosial, mesenjer, media cetak, media elektronik, dan media online).
9. Apakah Diskominfo juga memanfaatkan saluran komunikasi langsung seperti kelompok seperti arisan, saluran komunikasi public seperti melalui rumah ibadah, saluran komunikasi antar pribadi seperti surat menyurat, telepon, sms, dsb), dan saluran komunikasi tradisional (pesta adat, upacara kelahiran, pesta panen, dsb)?
10. Apakah Diskominfo melakukan uji awal materi komunikasi terkait langkah-langkah yang dilakukan?
11. Apakah Diskominfo melakukan analisis terhadap efek komunikasi?
(Dari berbagai studi yang pernah dilakukan terhadap efek komunikasi, ditemukan bahwa komunikasi massa lebih banyak berpengaruh terhadap pengetahuan dan wawasan seseorang , sedangkan komunikasi antar pribadi cenderung berpengaruh pada sikap dan perilaku).
12. Apakah ada upaya memobilisasi kelompok berpengaruh dalam upaya menggerakkan masyarakat untuk mengerti, memahami, dan menerima informasi yang disampaikan ?

13. Apakah ada anggaran yang dialokasikan terkait penanganan Misinformasi dan Disinformasi Covid 19? Jika ya, berapa besarnya dan darimana sumbernya?
14. Apa saja yang menjadi sasaran pembiayaan pos anggaran tersebut?
15. Siapa saja yang terlibat dalam program yang telah disusun?
16. Bagaimana bentuk koordinasi (proses) yang dilakukan dalam implementasi program tersebut?
17. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam implementasi tersebut dan bagaimana penanganannya?
18. Apakah Diskominfo melakukan tahapan evaluasi program?

DRAFT WAWANCARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULUKUMBA

- **PERKEMBANGAN COVID 19 DI KABUPATEN BULUKUMBA**
 1. Kapan Covid 19 masuk di Kabupaten Bulukumba?
 2. Bagaimana kurva perkembangan Covid 19 di Kabupaten Bulukumba?
 3. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang Covid 19?
 4. Apa saja stigma yang berkembang di masyarakat terkait Covid 19?

- **KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN DALAM PENANGANAN COVID 19 DI KABUPATEN BULUKUMBA**
 1. Apa saja langkah yang diambil Dinas Kesehatan dalam menangani Covid 19 di Kabupaten Bulukumba?
 2. Apa kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam implementasi kebijakan tersebut?
 3. Bagaimana upaya Dinas Kesehatan dalam menghadapi kendala tersebut?

- **MISINFORMASI DAN DISINFORMASI TERKAIT COVID 19 DI KABUPATEN BULUKUMBA**

1. Apakah Dinas Kesehatan mengetahui adanya informasi yang salah terkait Covid 19 di Kabupaten Bulukumba? Jika Ya, informasi apa sajakah itu?
2. Bagaimana cara mengetahui informasi salah tersebut?
3. Darimana masyarakat mendapatkan informasi salah tersebut?
4. Apa pengaruh informasi salah tersebut terhadap penanganan Covid 19 di Kabupaten Bulukumba?
5. Apakah ada strategi yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam penyebarluasan informasi terkait Covid 19?
6. Jika ada, seperti apa strategi yang dilakukan dan bagaimana bentuknya ?
7. Siapa saja yang dilibatkan dalam dalam strategi tersebut (lingkup Dinas Kesehatan, unsur pemerintah lainnya, institusi pendidikan, dan tokoh masyarakat?)
8. Apakah ada anggaran khusus yang dialokasikan dalam penyebarluasan informasi tersebut, kalau Ya, bersumber dari dana apa?
9. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam implementasi strategi tersebut?
10. Apakah ada pengaruh strategi yang dilakukan terhadap upaya penanganan Covid 19 di Kabupaten Bulukumba ?

DRAFT WAWANCARA
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA BULUKUMBA

1. Apa peran dan kedudukan Humas dalam penanganan Covid 19 di Kabupaten Bulukumba?
2. Terkait peran tersebut siapa saja pihak yang dilibatkan ?
3. Apakah ada sebuah perencanaan dan strategi dalam peran tersebut?
4. Bagaimana komunikasi yang dilakukan pemerintah terkait peran humas?
5. Bagaimana mekanisme dalam penyusunan pesan yang akan disampaikan?
6. Apakah ada upaya mengumpulkan informasi tentang Misinformasi dan Disinformasi tentang Covid 19 di Kabupaten Bulukumba?
7. Kalau ya, apa saja Disinformasi dan Misinformasi terkait Covid 19 yang ada di Kabupaten Bulukumba?
8. Darimana Misinformasi dan Disinformasi tersebut diperoleh?
9. Bagaimana upaya penanganannya?
10. Apakah ada anggaran khusus yang dialokasikan?
11. Apakah dari perencanaan tersebut dilakukan tahap evaluasi?

DRAFT WAWANCARA
TOKOH AGAMA KABUPATEN BULUKUMBA

1. Bisa dijelaskan tentang organisasi yang bapak pimpin?
2. Bagaimana keterlibatan organisasi yang bapak pimpin dalam Satgas Covid 19?
3. Apa saja yang dilakukan oleh organisasi Bapak dalam mendukung penanganan Covid 19?
4. Apakah Bapak pernah menemukan isu misinformasi dan disinformasi terkait Covid 19 dan penanganannya?
5. Apa yang bapak lakukan jika menemukan hal tersebut?
6. Apakah bapak melakukan upaya untuk menyebarluaskan informasi yang benar sesuai dengan kapasitas bapak?
7. Bagaimana respon masyarakat atas upaya tersebut?
8. Apa kendala yang dihadapi dalam upaya tersebut?

DRAFT WAWANCARA
MEDIA DAN ORGANISASI PROFESI JURNALIS DI KABUPATEN
BULUKUMBA

1. Bisa dijelaskan tentang perusahaan/organisasi yang bapak/ibu pimpin?
2. Bagaimana keterlibatan organisasi yang dipimpin dalam Satgas Covid 19?
3. Apa saja yang dilakukan oleh organisasi Bapak dalam mendukung penanganan Covid 19?
4. Apakah ada kerjasama khusus dengan pemerintah terkait penanganan Covid 19?
5. Apakah dalam melaksanakan tugas selaku jurnalis, pernah menemukan isu misinformasi dan disinformasi terkait Covid 19 dan penanganannya?
6. Apa yang dilakukan jika menemukan hal tersebut?
7. Apakah ada upaya inisiatif terkait penanganan misinformasi dan disinformasi Covid 19?
8. Apa kendala yang dihadapi dalam upaya tersebut?

TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA INFORMAN

Jumlah Informan : 9 Orang

| | |
|-------------------|--|
| Nama | : Drs. H. M. Daud Kahal, M.Si |
| Pekerjaan/Jabatan | : Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bulukumba |
| Hari/Tgl. | : Rabu, 5 Januari 2022 |
| Tempat | : Kantor Dinas Kominfo Bulukumba |

Apa peran dan kedudukan Diskominfo dalam penanganan Covid 19 di Kabupaten Bulukumba? Bisa disebutkan apakah ada regulasi yang dibuat terkait peran-peran tersebut khususnya terkait tugas utama Diskominfo secara umum dan juga tugas dalam Gugus Tugas

Yang pertama saya ingin menjelaskan bahwa Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bulukumba adalah Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan lembaga teknis daerah memiliki tiga urusan ya. Urusan Komunikasi dan Informatika, urusan statistik, dan urusan persandian. Ini tentu diatur berdasarkan peraturan daerah tentang susunan organisasi dan tata kerja atau perangkat daerah lah katakana kemudian ada peraturan bupati tentang SOTK ya, Susunan Organisasi Tata Kerja. Di dinas Kominfo ada 3 bidang 1 sekretariat, dimana masing-masing memiliki uraian tugas dalam rangka menerjemahkan ketiga urusan yang ada di Diskominfo.

Terkait dengan keterlibatan Diskominfo dalam Satuan Tugas Penanganan Covid 19 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri saya lupa nomornya, mulai tahun 2020 kami diberi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas selaku juru bicara percepatan penanganan Covid kemudian pernah menjadi koordinator tim data. Jadi fungsi kami adalah bagaimana menyampaikan menyebarkan informasi terkait situasi pandemik Covid di Kabupaten Bulukumba bagaimana strategi satuan tugas dan pemerintah daerah dalam hal ini dalam rangka melakukan upaya-upaya percepatan penanganan covid dan pemulihan ekonomi. Banyak hal yang telah dilakukan terutama dalam hal penanganan warga masyarakat yang terdampak ya terkena covid 19, baik

itu upaya dalam rangka penerapan protocol kesehatan, sosialisasinya, kemudian publikasinya dilakukan melalui radio melalui media social milik dinas kominfo, penerapan protocol kesehatan kemudian update kasus covid baik yang dirawat diisolasi ya, kemudian yang sembuh dan yang meninggal itu merupakan bagian dari peran kami untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat. Jadi ini tentu dilakukan dengan memanfaatkan semua sarana media yang ada di dinas kominfo baik radio suara panrita lopi, pengumuman melalui publikasi keliling maupun melalui media social yang ada di dinas kominfo facebook instagram twitter dan youtube. Kita maksimalkan untuk itu. Berkoordinasi bekerjasama dengan semua stakeholder ya.

Sekarang yang kedua Pak, terkait peran yang diberikan kepada Diskominfo dalam Gugus tersebut apakah Diskominfo itu sendiri terlebih dahulu melakukan riset untuk mengetahui masalah yang dihadapi dalam penanganan Covid khususnya di bidang tugasnya?

Kami tentu tidak bisa melakukan upaya-upaya riset seperti itu karena disamping waktu yang sangat terbatas dan peran yang harus kami lakukan itu adalah sesegera mungkin. Yang kami lakukan adalah mencari referensi melalui google, kemudian referensi mengenai data-data yang dishare di grup-grup whatsapp baik yang secara nasional ada di grup kadis kominfo se Indonesia ada info berbagi informasi covid di tingkat Sulawesi selatan ada disitu semua media ya, disitu kami dilibatkan sebagai juru bicara covid dan disitu kami selalu mendapatkan informasi referensi, dan termasuk data-data yang di update oleh dinas kesehatan dalam hal ini.

Ada grup satgas yang kami bentuk dan saya adminnya disitu kita saling share informasi dan mencari apa solusi-solusi terhadap permasalahan yang kita temukan.

Jadi referensi yang kita dapatkan melalui grup-grup whatsapp ini bukan grup whatsapp yang istilahnya memang dibuat oleh orang-orang yang punya kompetensi dalam penanganan itu?

Ya, disitu memang.

Siapa saja yang ada dalam grup whatsapp itu?

Grup whatsapp secara nasional ya ada level direktur di kementerian Kominfo. Kemudian untuk grup whatsapp di tingkat apa ya, di Berbagi Informasi Covid itu termasuk dari juru bicara kementerian kesehatan. Ada masuk disitu kemudian para bupati, walikota di sulsel, kemudian juru bicara satgas covid

dan media-media yang selama ini aktif memberitakan terkait penanganan covid, walau didinas kesehatan juga ada disitu se Sulawesi Selatan.

Kalau di Kabupaten Bulukumba sendiri Pak, siapa saja sih yang dilibatkan dalam penanganan covid 19 khususnya dalam peran kita melaksanakan tugas-tugas itu dalam penyampaian informasi?

Di grup satgas covid atau di SK Bupati yang menetapkan satgas itu kan didalamnya ada kami libatkan beberapa media ya, khususnya jurnalis online, ada rekan-rekan ya katakanlah dai muda yang selain sebagai wartawan ya, pers, dia juga bisa mensosialisasikan lewat dakwah-dakwah. Dan beberapa pihak yang kami nilai bisa membantu dalam mempublikasikan. Selain itu kita berkoordinasi dengan Kodim dengan Polres dengan organisasi ormas-ormas ya, katakanlah MUI, dan lain-lain sebagainya. Kementerian Agama kita berkoordinasi dengan semua unsur ya, kepala OPD apakah kita libatkan disitu, kebetulan kami admin grup tentu informasi termasuk di dinas pendidikan yang menangani pembelajaran terbatas begitu, kementerian agama, dan masyarakat yang tentu membutuhkan informasi dari satgas kami fasilitasi.

Kalau di Satgas kan otomatis kita yang tercatat disitu, kemudian pelibatan pihak-pihak lain apakah dibuatkan surat keputusan lain atau itu hanya dalam fungsi koordinasi sebagai bentuk inisiatif saja?

Disitu ada kordinator bidang publikasi merangkap juru bicara Satgas percepatan penanganan Covid. Jadi selain kordinator ada kan anggota-anggota di bawah. Merekalah yang dilibatkan. Sebagian memang masuk dalam struktur. Selama ini kami tiap saat menerima permintaan untuk wawancara baik televisi, radio, maupun media-media online dan cetak, yang membutuhkan informasi termasuk dalam rangka percepatan vaksinasi di Kabupaten Bulukumba.

Kalau penyampaian informasi itu pak, apakah sudah ada jadwal yang tersusun, atau kondisional saja?

Kondisional, artinya ketika ada yang membutuhkan kami perlu menyampaikan ke masyarakat sesuatu hal ya. Kami juga banyak menyampaikan melalui radio terkait himbauan-himbauan Pak Bupati, kami sendiri bagaimana masyarakat itu bisa menyadari pentingnya protocol kesehatan, mencegah misalnya kerumunan, mencegah ya pembatasan-pembatasan yang diatur dalam PPKM itu yang kita terapkan.

Jadi Pak, program tersebut mulai berjalan sejak ditetapkannya Gugus Tugas itu di Kabupaten Bulukumba?

Ya. Awalnya kan Gugus Tugas setelah itu berubah menjadi Satgas percepatan penanganan dan pemulihan ekonomi nasional itu yang dibentuk di daerah Kabupaten Bulukumba. Disitu tidak hanya berbicara dalam konteks kesehatan tapi juga berbicara tentang ekonomi, bagaimana membangun jaring pengaman social untuk masyarakat yang terdampak covid misalnya pemutusan hubungan kerja, pengusaha-pengusaha UMKM yang bangkrut kemudian koperasi-koperasi dibantu melalui dana jaring pengaman social dari pemerintah.

Itu Satgas Pak, cuma sebentar sekali ya sampai akhirnya kemudian digantikan perannya sama Gugus Tugas

Gugus tugas dulu, nda sampai setahun dia kemudian berganti jadi satgas. Setelah di level nasional itu bentuk organisasi gugus tugas berubah akibat karena adanya kebijakan terkait percepatan pemulihan ekonomi nasional, maka itu terbagi dua peran yang harus dilakukan disitu. Tidak hanya percepatan penanganan covid tapi pemulihan ekonomi nasional juga harus berjalan secara parallel.

Apakah ada perencanaan atau strategi khusus pada awal pembentukannya di Diskominfo itu sendiri

Tidak ada perencanaan secara khusus tapi lebih kepada kita menjalankan instruksi menteri dalam negeri seperti pemerintah daerah harus terbentuk ini dan kebijakan realokasi refocusing anggaran itu mengacu pada pembentukan satuan tugas .

Jadi langkah yang diambil itu lebih kepada ketika ada sesuatu maka itulah yang kita tangani begitu ya jadi bukan pada perencanaan dalam kurun waktu tertentu?

Tidak

Kemudian Pak ada nda anggaran khusus yang dialokasikan terkait penanganan covid 19 dalam bidang data?

Dulu pernah ada untuk Tim Data makan minum tapi itu pengelolaan anggarannya di Dinas Kesehatan. Bukan di kita. Jadi tidak ada. Kami dengan anggaran yang ada di kegiatan yang ada saja.

Jadi hanya menggunakan anggaran yang melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika?

Iya. Tapi tidak ada secara khusus yang mengatakan bahwa khusus penanganan covid

Kemudian pak, dari semua proses-proses yang dilakukan meskipun tidak ada perencanaan, apakah melakukan evaluasi secara mandiri begitu terkait sejauh mana ini program sudah terlaksana atau tercapai sesuai dengan harapan ada tidak proses evaluasi baik periode tertentu begitu karena tidak ada akhir program ya Pak?

Sebenarnya ini kan bukan program dan kegiatan Cuma penugasan-penugasan yang sifatnya insidental dan tentu kami dalam rangka mengevaluasi melihat perkembangan di lapangan apakah masyarakat menerapkan itu misalnya atau masyarakat merespon apa yang disampaikan oleh pemerintah. Saya pikir bahwa ketika kita bisa meyakinkan masyarakat terkait informasi itu, disitulah letak keberhasilan komunikasi pemerintah itu bahwa kemudian banyak berkembang informasi hoaks tentang covid belakangan tentang vaksin itu tentu juga menjadi bagian dari tugas kami untuk meyakinkan masyarakat bahwa ini adalah sesuatu hal yang penting yang tidak boleh dikesampingkan oleh masyarakat. Dan mengenai berita-berita hoaks itu sendiri tentu menjadi ranah daripada kementerian kominfo untuk melakukan pemblokiran terhadap media-media sosial yang melakukan itu. Sejauh ini informasi yang kami dapat hampir duaribu platform media yang memberitakan berita hoaks dan itu sudah dilakukan upaya-upaya untuk mencegah penyebaran itu melalui, apa namanya ya, menghapus platform media sosial tersebut dari peredaran.

Jadi Kominfo Bulukumba yang melaporkan ke kementerian untuk ditindaklanjuti?

Sejauh ini sebenarnya belum ada informasi hoaks yang diproduksi oleh masyarakat disini yang kami tahu. Itu dari luar dan kominfo mendeteksi.

Tapi apakah Diskominfo memang melakukan upaya mengumpulkan Misinformasi dan Disinformasi Covid yang sifatnya lokal?

Ya tidak ada upaya tersebut. Dan memang kami tidak mendapatkan laporan juga mengenai hoaks pada skala kabupaten.

Saya sempat melihat Pak, kemarin yang informasi ketika Wakil Bupati Bulukumba periode sebelum ini diberitakan bahwa beliau terpapar, itu termasuk salah satu hasil laporannya Kominfo Kabupaten ya Pak?

Sempat Kabag Hukum melapor di Polisi ya.

Jadi memang prosesnya itu selain ke Kominfo juga mempolisikan ya pihak yang menyampaikan informasi salah tersebut?

Artinya ya, kita laporkan juga ke Dewan Pers bahwa dia memberitakan sesuatu yang tidak benar. Tapi itu kan masih ada Bagian Humas itu waktu ya. Jadi bukan Diskominfo.

Kemudian yang kedua pak seperti disampaikan tadi bahwa tidak ada misinformasi dan disinformasi yang sifatnya local ya pak, dan itupun medianya juga bukan media disini ya?

Ya bukan. Dan satu kali pernah terjadi masalah di polisi dan di lapor. Andi Ulla dilapor, saya di lapor. Terkait pengungkapan identitas dalam pemberitaan dan itu narasumbernya andi ulla, dilapor ke polisi. Tapi belakangan kita damai.

Identitas pasien begitu?

Ya. Pemahamannya mereka bahwa tidak boleh diungkapkan media. Tapi ini ada dua perspektif yang sulit dipisahkan ya. Antara tuntutan transparansi karena ini menyangkut kesehatan yang lain, di satu sisi bahwa ada undang-undang yang mengatakan tidak boleh dipublikasi nama identitas pasien secara detail atau yang meninggal

Sebenarnya kemarin yang sempat saya baca memang di uu kesehatan pak ada begitu. Misalkan nama pasien harus dilindungi tapi karena ini wabah harus disampaikan. Mungkin itu juga yang menjadi pertimbangan pemerintah kemudian memberi label dengan nomor saja begitu ya Pak?

Ya. Register

Apakah itu yang menjadi pertimbangan sebagai titik temu antara dua peraturan itu tadi ?

Ya kita salah satunya pertimbangan seperti itu

Jadi yang disampaikan ke masyarakat informasinya itu bentuknya seperti apa?

Kita hanya menyampaikan nomor register

Tempat tinggal atau alamat pak?

Tidak. Alamat hanya kecamatan, desa/kelurahannya. Kita tidak mencantumkan bahwa dia di jalan ini nomor sekian nda.

Begini Pak. Ini kan kalau di tingkat lokal belum ada yang ditemukan Misinformasi dan Disinformasi. Tapi kan di level nasional, kementerian sendiri secara berkala itu menyampaikan ya, merilis begitu ya bisa dibilang. Apakah ada memang yang terkait Covid yang secara khusus disampaikan?

Ya. Ada update. Ada link nya kementerian Satgas Pusat.

Misinformasi atau hoaks begitu?

Di kementerian Kominfo kalau tentang itu.

Tapi informasi itu, tersampaikan ke Kabupaten/Kota?

Disampaikan kepada kami di grup forum kadiskominfo itu. Jadi yang menentukan itu hoaks atau tidak di kementerian. Kemudian kami sebar ke grup satgas dan beberapa grup lainnya yang kami anggap bisa menjadi penyambung.

Itu secara berkala atau tidak pak, misalnya update setiap 1 bulan?

Tidak. Dia tergantung apakah ada dalam satu hari, tapi biasanya ada.

Apakah akses mengenai informasi itu hanya didapatkan melalui grup saja?

Ada sebenarnya sih link nya kalau kita mau telusuri. Tetapi lebih mudah kalau lewat grup.

Itu tadi, setelah mendapatkan informasi yang tidak benar itu, langkah selanjutnya yang dilakukan itu apa pak?

Ya memberikan penjelasan. Memberikan klarifikasi ketika itu muncul dari media. Dan kita memberikan penjelasan terkait hal-hal yang penting untuk dipahami masyarakat ketika informasi itu tidak benar ya kita sampaikan hal yang benar. Yang semestinya seperti ini. Dan kalau itu tidak benar, ya kita jelaskan lewat media. Kami sering talkshow atau menjadi narasumber di radio.

Jadi ketika melakukan talkshow atau kita melakukan press conference salah satu pertimbangannya itu ya, bahwa ada informasi yang salah yang beredar yang kita dapatkan melalui rilis?

Ya. Atau ada pemahaman yang keliru di masyarakat rasa was-was terkait vaksinasi misalnya atau berita hoaks ya kami undang pihak Dinas Kesehatan dan kami libatkan organisasi kemasyarakatan untuk memback up itu bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah katakanlah dalam hal ini Dinas Kesehatan terkait vaksinasi seharusnya begini ya, ada penguatan dari pihak lain.

Jadi kita memilih tema nya random saja ya?

Ya tergantung kebutuhan.

Ketika misalnya masyarakat lagi heboh tentang isu-isu tertentu kemudian kita mencoba menangkap itu dengan melakukan talkshow ya?

Selalu saya melihat apa fenomena diluar yang seperti ini ya kami respon dengan cara itu.

Apakah terinventarisir semua kegiatan-kegiatan itu?

Ada di facebook SPL. Beberapa yang terkait. Jadi kami selalu memanfaatkan SPL. Pernah juga diundang di Cempaka 2 kali

Kalau memanfaatkan media lain begitu pak, misalnya media cetak dan online?

Ya. Terutama Update-update perkembangan Covid, data, kemudian vaksinasi sekarang.

Masuk ke strategi pak, dalam strategi itu kan ada beberapa proses. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, siapa saja yang dilibatkan sebagai komunikator dalam penyampaian informasi khususnya terkait penanganan misinformasi dan disinformasi Covid 19 di Kabupaten Bulukumba?

Seperti tadi saya katakan bahwa selaku juru bicara dan tim humas dan publikasi satgas covid, disitu ada beberapa yang terlibat khususnya dari kalangan pers dan penceramah ya, dan memiliki kemampuan melakukan komunikasi publik. Katakanlah mereka menyampai lewat kegiatan kegiatan kegamaan hari jumat misalnya khutbah, atau ceramah-ceramah di berbagai tempat. Itulah sehingga kami libatkan mereka. Ketua Majelis Dai Muda ya. Itu

kan mereka punya jaringan. Kemudian ketua JOIN. Mereka kan jurnalis online berhimpun disitu, yang diharapkan bisa memback up proses komunikasi dan publikasi yang kami lakukan. Di radio sendiri ada teman-teman penyiar yang kami libatkan untuk talkshow atau menyiarkan iklan-iklan terkait Covid, protokol kesehatan kemudian narasumber-narasumber yang kami undang kesini untuk bicara tentang itu.

Ada juga kami libatkan dari unsur pendidikan. Saya juga masuk dalam grup yang terdiri atas elemen-elemen pendidikan, ada guru kepala sekolah dan pengawas yah, melalui itu juga saya membagikan informasi kesitu. Memang diminta khusus untuk menyampaikan update Covid. Ada juga kampus yah Stikes.

Selain itu ada tokoh masyarakat. Ketua MUI, Ketua Baznas. Juga ada camat ya yang diharapkan akan menyambung kebawah.

Bagaimana dengan unsur Pemerintah Lainnya di jajaran instansi vertikal?

Ya. Ada Kodim yah. Bahkan dia menjadi wakil ketua satgas ya. Kodim Polres.

Apa alasannya memilih tokoh-tokoh tersebut?

Paling tidak mereka mempunyai referensi dan kajian yang diharapkan bisa membantu kami untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Meskipun kami juga berdiskusi terkait adanya perbedaan penafsiran dari berbagai kalangan, ada yang mengatakan Covid itu ada, ada yang mengatakan tidak, tapi intinya bahwa sebagai pemerintah tentu kita harus berpedoman pada kebijakan pusat ya, bahwa pemerintah daerah harus melakukan langkah-langkah ini persoalan bahwa kemudian ada yang mengatakan Covid itu tidak berbahaya, tapi kebijakan terkait itu sudah jelas ya. Ada regulasi, instruksi yang disampaikan kepada Daerah dan itu menyangkut. Sangat berhubungan dengan pengalokasian dan penggunaan anggaran yang ada. Dan ada reward dan punishment ketika ada pemerintah daerah tidak taat dengan aturan itu.

Apa alasan pelibatan Tokoh Agama dan tokoh lainnya yang notabene tidak memiliki latar belakang kesehatan? Dan pesan seperti apa yang diharapkan akan dapat mereka sampaikan?

Mereka sangat penting ya, karena kami tidak mampu menjadi pemeran tunggal ya didalam upaya upaya pencegahan penanganan Covid ini, kami

berharap mereka bisa menjadi bagian daripada, penyambung kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dan meyakinkan masyarakat bahwa memang ada dampak serius terkait pandemi. Pelibatan mereka sangat penting karena mereka adalah public figure ya. Yang bisa menjadi panutan. Dan orang mau mendengar apa yang mereka katakan.

Mengapa tidak melibatkan tokoh adat juga pak?

Sebenarnya kalau mau dibilang tokoh adat, dia adalah bagian dari tokoh masyarakat. Dan ini lebih cenderung mengarah kepada peran-peran pemerintah ya. Katakanlah ada camat disitu berperan aktif, berkomunikasi, apakah dia melibatkan tokoh adat di wilayahnya itu kan kita limpahkan sebagai satgas kecamatan.

Siapa saja yang menjadi target khalayak sasaran informasi?

Kita tidak menerapkan penyampaian satu informasi yang eksklusif yang mengatur segmen tertentu ya. Tapi lebih kepada secara umum. Meskipun demikian penerapan kebijakan seperti itu, juga tetap dilakukan. Katakanlah kebijakan Work From home, di lingkungan kerja instansi, dan sekolah daring. Dan ini juga yang menjadi pertimbangan dari Kominfo untuk mensupport kebijakan tersebut dengan penyediaan Wifi publik.

Siapa saja yang dilibatkan dalam proses penyusunan pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat?

Ya saya bersama tim ya, ada Andi Ulla di Humas dengan bidang e government dan radio ya. Kalau terkait update data, datanya dari Dinas Kesehatan, kemudian kami kelola menjadi infografis. Ada tim data ya. Jadi model informasinya itu ada rilis, pengumuman, update data. Isi pesannya itu tentang bagaimana kita mewaspadaai, menghindari hal-hal yang menyebabkan penularan. Katakanlah dengan penerapan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Dan itu juga dilakukan oleh pihak-pihak satpol pp untuk melakukan sweeping disiplin protokol kesehatan.

Apa sih isu hoaks yang paling menjadi perhatian pemerintah daerah khususnya dalam upaya penanganan Covid 19?

Saya kira hal-hal yang umum saja ya. Yang kami lakukan selama ini adalah focus agar bagaimana masyarakat taat terhadap protokol kesehatan dan melakukan isolasi ketika terpapar. Kebijakan grebek Covid adan Grebek vaksin yang dikeluarkan Bupati tentu menjadi salah satu solusi yang boleh dikatakan berhasil dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid di

Bulukumba. Karena dalam proses itu, terjadi penekanan tingkat penularan Covid dan angka kematian yang sempat memuncak di Bulan Juli 2021 ya dengan adanya gelombang kedua.

Media apa saja yang digunakan sebagai saluran informasi pemerintah?

Kami menggunakan radio, media online, media cetak, televisi. Jadi kami membuat video kegiatan yang dishare . Jadi pernah suatu ketika ada keluarga yang menolak dinyatakan Covid, kemudian setelah kami mengumpulkan data yang diperlukan, kami melakukan jumpa pers bersama pihak rumah sakit juga dan mengundang seluruh media yang ada di Bulukumba.

Apakah dilakukan semacam uji awal komunikasi sebelum diimplementasikan?

Kalau itu konferensi pers iya. Kami harus melakukan pemetaan, mengumpulkan informasi, kemudian metodenya juga.

Apakah juga dilakukan evaluasi pasca implementasi?

Kita Cuma melihat perkembangan respon dari masyarakat ya. Karena kita hanya membagikan di grup ya, disamping sosial media juga seperti facebook. Dari situ saja kami melihat seperti apa masyarakat menanggapi. Disitulah kami menilai keberhasilannya.

Ada tidak upaya memobilisasi kelompok berpengaruh?

Saya rasa itu peran-peran yang dilakukan pimpinan ya.

Bagaimana dengan alokasi anggaran pak?

Tidak ada yang khusus, hanya melekat dari yang sudah ada. Selama ini kan kami sudah bekerjasama terkait pemberitaan dengan media ya, ada advertorial juga. Jadi ada satu ya. Kami juga mensupport kebijakan dari berbagai dinas terkait dengan Covid, seperti dukcapil dan pariwisata. Karena terkait pelayanan serta aturan kepariwisataan yang terkena dampak pandemi. Jadi koordinasinya lewat komunikasi lewat grup ya, kadang persuratan.

Sebenarnya seperti apa kendala dalam penanganan mis dan dis informasi itu?

Ya keterbatasan anggaran, masyarakat yang merasa tidak sejalan dengan yang dilakukan pemerintah ya.

penanganan Covid ya.

Yang terjadi adalah kami belum diberi dukungan anggaran untuk melakukan penyebaran informasi. Termasuk tidak ada ada pelatihan untuk meningkatkan kompetensi untuk memahami secara detail seperti apa sebenarnya kita menyikapi pandemic covid ini. Ini kan bahasa medis yang harus disampaikan ke publik sementara kami belum pernah mendapatkan pelatihan mengenai itu.

Sementara terkait pengklasifikasian mis dan disinformasi, secara umum kita hanya bisa menganalisa bahwa itu adalah kesalahan dalam memahami informasi, perbedaan persepsi dalam menanggapi sebuah informasi, sehingga dalam menangkap sebuah informasi sehingga dengan demikian ini terkait sumber daya yang memang masih butuh penguatan kapasitas. Selama ini memang tidak pernah ada hal-hal yang kita peroleh. Baik dukungan anggaran dan program kegiatan.

Apakah dari langkah-langkah yang sudah dilakukan, ada upaya mengevaluasi?

Secara khusus tidak ada ya. Karena itu kan bukan program kegiatan. Kami Cuma melihat bagaimana dinamika yang berkembang di masyarakat. Dan saya nilai secara umum masyarakat bisa menerima upaya yang dilakukan pemerintah terkait

Jadi apakah ada treatment khusus dalam penanganan mis dan disinformasi?

Sebenarnya begini. Di Satgas covid itu yang bertindak sebagai juru bicara kan kadis Kominfo. Jadi informasi itu tidak keluar kalau bukan dari Kadis Kominfo. Jadi terkait pemahaman itu kami sebenarnya punya referensi dan background selaku orang yang pernah melalui jenjang pendidikan katakanlah jurusan komunikasi. Kemudian jabatan humas sekian lama, sehingga penunjukan kami selaku jubiir saat itu tidak lagi berada dalam tataran untuk mengklasifikasi informasi yang salah tersebut karena kami sudah memahami seperti apa bentuk informasi tersebut.

Jadi tidak ada strategi tertentu ya. Kami tidak terlalu terpaku pada teori-teori komunikasi ya. Karena dari pengalaman dalam pemerintahan, hal itu sudah terseleksi dengan sendirinya. Jadi kita menyampaikan saja informasi-informasi yang benar. Sesuai dengan tupoksi, ada hal-hal yang terkait dengan aturan-aturan yang kita dapat dari pemerintahan misalnya ada instruksi dari menteri dalam negeri, itu yang kami sampaikan.

Saya kira kita juga sulit melakukan pengendalian itu ya kalau memang terjadi di sosial media. Karena pengendaliannya bukan di kita. Hanya bisa mengklarifikasi ketika itu menjadi bagian dari ranah kita, atau kita yang menjadi obyek atau sasaran.

Baik Pak. Terimakasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Sukses selalu.

| | |
|-------------------|--|
| Nama | : dr. Hj. Wahyuni AS., MARS |
| Pekerjaan/Jabatan | : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba |
| Hari/Tgl. | : Kamis, 6 Januari 2022 |
| Tempat | : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba |

Kapan kasus pertama Covid 19 di Kabupaten Bulukumba?

Keberadaan Covid di Bulukumba itu dimulai di tahun 2020 pada akhir Maret. Jadi saat itu ada pendatang dari Malaysia. Ternyata ada anak-anak yang ditemukan dalam pelaksanaan tracing ternyata hasil laboratoriumnya positif. Itu awal masuknya Covid di Kabupaten Bulukumba. Kemudian setelah itu ada beberapa dari pesantren luar Makassar juga yang datang di Bulukumba berlibur, ternyata setelah kami tracing dan testing, hasilnya positif semua. Tentunya kami mengalami tantangan karena namanya Covid saat itu kan masyarakat masih awam. Salah satu penanganannya kan harus diisolasi. Dalam hal ini yang harus dilakukan adalah dirujuk karena memang bergejala. Kami memiliki banyak tantangan pada saat itu karena harus diedukasi masyarakat dan memang harus dirujuk ke rumah sakit penanganan Covid di Makassar dalam hal ini Rumah Sakit Wahidin saat itu. Itu pengalaman pertama juga buat kami, sebagai kepala dinas yang tentunya yang menangani Covid. Tapi seiring dalam perkembangan waktu, karena bagaimanapun juga agar penyebaran ini tidak menyebar kemana-kemana, kami harus memang kerjasama dengan aparat TNI, Polres, kemudian dari Satpol PP untuk sama-sama bagaimana memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa kasus yang terkonfirmasi ini harus dievakuasi. Dirujuk ke Makassar pada saat itu. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu itu semua bisa tertangani.

Itu yang menjadi tantangan bagi kami di Dinas Kesehatan karena dari mulut ke mulut masyarakat tidak mau karena merasa di Covidkan. Walaupun pada

saat itu keluar hasil pemeriksaan laboratorium positif. Kami harus memperlihatkan keluarga dan yang terkonfirmasi bahwa kami harus mengevakuasi dan ditangani ke rumah sakit rujukan.

Bisa saya tahu kasus pertama tersebut di daerah mana?

Yang pertama itu di Bonto Masila Kecamatan Gantarang. Kemudian ada beberapa kasus dari pondok pesantren yang kebetulan berlibur di Bulukumbung, dan terdeteksi di bandara Makassar. Kami dapat informasi dari KKP dan kami langsung turun melakukan kontak tracing. Artinya dari kontak yang ada, kami harus memeriksa kontak-kontak yang sudah berinteraksi dengan orang yang positif ini.

Jadi seperti apa proses pemahaman dan edukasinya?

Dilakukan secara langsung ke Masyarakat di wilayah yang terdapat kasus terkonfirmasi.

Bagaimana pemahaman masyarakat terkait Covid 19 baik pada masa awal hingga saat ini?

Memang awalnya banyak informasi-informasi yang tidak jelas bagi masyarakat. Karena kita tahu kan sekarang era keterbukaan, era digitalisasi, era sosmed, semua informasinya kan keluar masuk langsung dari masyarakat. Inilah hal-hal yang memang kami harus bekerjasama. Artinya selain garda terdepan kami yaitu puskesmas yang harus terjun mengedukasi, menghayo-hayo masyarakat, juga ya tentunya dalam hal ini ada Kominfo yang membantu kami, melalui edukasi-edukasi yang ada. Sehingga pelan-pelan informasi-informasi yang tidak benar itu bisa tercounter dan tersampaikan ke masyarakat sebenarnya ya memang ada Covid, dan harus dipercaya. Terkait prosedur penanganannya ya memang harus dikarantina. Harus diisolasi. Untuk memutuskan mata rantai. Tapi dalam perkembangannya saya kira itu berjalan. Masyarakat mulai paham.

Sebenarnya yang paling sering ditemui oleh petugas kesehatan pandangan salah seperti apa itu?

Terkait pandangan salah, artinya memang awalnya memang mereka tidak percaya. Walaupun sudah ada hasil laboratorium bahwa dia positif mereka tidak menerima. Mereka beranggapan bahwa sengaja di positifkan. Nah tentunya hal ini menurut kami sangat berat sebenarnya. Bahkan saat itu, ada beberapa dari LSM yang keberatan dan ka dilapor karena mempublikasikan hasil hasil laboratorium itu. Bukan dipublikasikan. Hanya mau disampaikan ke

orang yang bersangkutan, ke keluarga yang bersangkutan bahwa ini positif hasilnya. Karena kalau tidak diperlihatkan itu berarti kan kami dianggap mengada-ada. Ada beberapa yang melaporkan kami tapi Alhamdulillah setelah dikasih pemahaman akhirnya dia paham.

Bagaimana kebijakan awal Dinas Kesehatan dalam menyampaikan hasil pemeriksaan laboratorium khususnya yang terkonfirmasi positif?

Awalnya kamu selalu melapor dulu ke bapak bupati. Pada kasus positif. Nanti Bupati akan memerintahkan semua stakeholder yang ada. Artinya informasi itu memang tersampaikan ke semua. Ke semua jajaran pihak yang turun kebawah. Termasuk juga pak desa. Jadi yang harus sebenarnya informasi yang cepat ke masyarakat ke yang positif itu tersampaikan ke pak desa. Nanti pak desa menyampaikan ke keluarga, keluarga menyampaikan ke yang bersangkutan. Jadi garis komandonya kalau ada yang positif, jadi saya kepala dinas harus melaporkan ke bupati sebagai ketua satgas, ketua satgas ini kemudian yang menginformasikan ke semua stakeholder yang ada dibawah dan tersampaikan ke pak desa, pak dusun, dan ke keluarga.

Kalau posisi Dinas Kesehatan dalam Satgas Covid apa itu?

Dia posisinya dalam pencegahan dan penanganan Covid. Jadi pencegahan dalam hal ini termasuk juga edukasi ke masyarakat. Kami kan juga ada program promosi kesehatan. Jadi kami menggunakan mobil keliling menghayo-hayo masyarakat bahwa kita jangan takut dengan Covid, karena meski jelas ada tapi ketika kita mematuhi protokol kesehatan dengan 3T ya itu tadi tracing, testing, dan treatment, treatmentnya kan pasti isolasi ataukah dirawat kalau memang bergejala, itu sebenarnya bisa terhindar. Kemudian itu tadi tadi jaga jarak harus dipenuhi.

Jadi mensinkronkan dengan program yang sudah ada di Dinas Kesehatan khususnya di bidang promkes dalam hal edukasinya?

Iya, jadi dilakukan dan disampaikan secara langsung ke sasaran-sasaran yang ada di masyarakat.

Seperti apa saja strategi yang dibuat oleh Dinas Kesehatan dalam penanganan Covid 19 di kabupaten Bulukumba?

Karena kami di bidang penanganan dan pencegahan Covid tentunya langkah yang kami lakukan yakni bagaimana tim tracer yang ada di Puskesmas itu harus diaktifkan. Tim tracer itu kan tujuannya ketika ada yang terkonfirmasi positif, dia harus memeriksa kontak-kontaknya kemudian mengambil

spesimennya, kemudian spesimennya dibawa ke Makassar untuk pemeriksaan laboratorium.

Kemudian yang kedua ketika ada yang terkonfirmasi positif, kami tentunya harus merujuk kalau bergejala, tapi yang tidak bergejala selama ini disiapkan rumah isolasi mandiri di masing-masing desa dengan anggaran dari desa. Jadi masing-masing desa ada rumah karantina, rumah isolasi yang disiapkan di desa itu. Jadi ketika ada yang tidak bergejala, langsung dibawa kesana.

Kemudian yang ketiga, ada kebijakan dari pemerintah yaitu grebek covid. Ini dilakukan oleh puskesmas bersama pustu dan poskesdes turun dari rumah ke rumah menilai ada tidaknya gejala-gejala dan jika ada langsung dikarantina di rumah, tidak boleh kemana-mana, langsung isolasi mandiri di rumah, kemudian yang tidak bergejala silahkan beraktivitas tapi tentunya dengan patuh kepada protokol kesehatan. Saya menilai grebek covid ini cukup efektif karena bisa langsung melakukan pemilahan antara yang bergejala dan tidak bergejala.

Jadi grebek covid ini *door to door*. Bukan dari hasil *tracing*. Langsung dari desa oleh pustu dan poskesdes dan juga aparat desa, turun dari rumah ke rumah. Mencari tau, ada tidak yang punya rumah itu mempunyai gejala, batuk, demam. Pasti kan juga diperiksa dengan termogun, kemudian untuk mengetahui ada atau tidak gangguan napas, dan nada juga diperiksa dengan oximeter, jika 95 kan berarti normal, kalau dibawahnya kan berarti ada apa-apa dalam gangguan paru yang ada. Jadi saya kira itu sangat efektif memilah mana masyarakat yang sehat dan mana yang bergejala.

Bagaimana masyarakat merespon hal tersebut?

Saya kira responnya baik, semuanya mau. Memang yang menjadi tantangan tentunya ketika dia bergejala. Dan setelah diketahui bergejala, hasil lab nya positif, nah inilah yang bergejala kemudian dirujuk. Kemudian kemarin kana da program dari provinsi terkait dengan duta covid. Jadi mereka yang positif diantar langsung menggunakan kendaraan PSC Bulukumba dirujuk untuk berwisata ke hotel yang disediakan. Jadi itu juga yang memudahkan kita di Bulukumba untuk memutuskan mata rantai karena adanya program dari gubernur provinsi menyiapkan tempat isolasi di hotel.

Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut?

Kendala yang dihadapi ketika mau dibawa ke Makassar, dirujuk ke hotel. Lama itu edukasinya. Karena yang dibawa itu kan mobil bus. Tidak mungkin kan satu satu. Betul-betul disitulah harus diedukasi, pendekatan khusus.

Mereka tidak mau langsung dibawa, ada satu dua misalnya kami siap jam 10 pagi, tapi yang lainnya belum siap, dan ini dengan berbagai alasan, kayak misalnya ada anak kecilnya. Ataukan bagaimana saya nanti di hotel. Apakah saya seperti di penjara. Artinya banyaklah alasan-alasannya setelah kita edukasi, sampaikan, nanti dibawa di hotel disana untuk refreshing, rekreasi, dilayani ki, sama seperti ketika masuk di hotel. Semua kebutuhan ta dilayani dengan baik, kemudian kita berada di tempat yang sejuk nyaman ber ac, kemudian ada senam-senam kebugaran didalamnya, jadi bukan berarti diisolasi betul dalam satu kamar tidak bisa keluar-keluar. Itu tidak. Akhirnya mereka mau. Kan ada juga yang langsung mau dibawa ke Makassar. Karena mungkin juga mendengar cerita-cerita yang sudah menjalani itu tersampaikan. Akhirnya mereka mau.

Yang menjadi sasaran khalayak untuk di edukasi biasanya siapa saja?

Kami mempertimbangkan latar belakang masyarakat yang diedukasi. Untuk yang latar pendidikannya tinggi dengan buruh harian pasti beda sekali. Orang-orang yang berpendidikan tinggi langsung mau. Tapi kalau orang-orang yang berpendidikan rendah kemudian dia pekerja tani, banyak kan faktor yang dipikirkan. Bagaimana dia meninggalkan rumah. Siapa yang mau biayai keluarga yang ditinggalkan, bagaimana dengan pekerjaannya yang ada, dia tidak akan bisa produktif.

Informasi salah seperti apa yang beredar di masyarakat yang ditemukan oleh para petugas kesehatan di lapangan?

Yang pertama dia tidak percaya adanya Covid. Dia mengatakan bahwa Covid itu dibuat-buat, sengaja. Tapi kan kita tidak boleh mengatakan bahwa kita harus mengcounter informasi tersebut, karena salah ya harus diluruskan. Kemudian yang masalah itu kalau orangnya sudah tahu tapi disebarkan informasi yang tidak benar tersebut. Yang jelas kan bagaimana menhandel hal-hal ini supaya masyarakat itu harus memahami karena bagaimanapun juga sekarang yang harus digencarkan prokes tetap jalan karena pandemic belum berakhir. Kemudian percepat vaksinasi. Itu memang hal yang sangat penting untuk dilakukan. Jadi Mis dan Dis Informasi, merupakan bagian dari tantangan kami bagi petugas kesehatan, untuk meluruskan hal-hal tersebut, supaya masyarakat jangan terprovokasi yang tidak benar. Hal ini juga diperparah dengan rendahnya tingkat kesadarannya rendah. Jadi sangat dibutuhkan peran dan bantuan Kominfo untuk menyebarluakan informasi tentang Covid serta cara pencegahannya.

Karena kalau masyarakat percaya dengan informasi salah yang beredar, itulah makanya menjadi salah satu penyebab Bulukumba belum mencapai Herd Immunity 70%. Karena memang salah satu tantangannya itu, Hoaks nya itu. Kemudian yang kedua juga, ada kemarin kasus kan meninggal, mereka sangka kan penyebabnya karena vaksin, namun setelah ditelusuri ternyata memang sudah ada penyakit di tubuhnya. Ini terjadi di Bulukumba.

Setelah kejadian ini kami kan langsung melaporkan Komda KIPI, kemudian ada tim yang turun untuk menyelidiki penyebabnya dan hasilnya disampaikan dan dipublikasikan. Kami lalu menyampaikan hasil tersebut ke media, bahwa itu tidak benar. Jadi tidak harus takut dengan vaksin yang ada. Dan memang dari pihak pemerintah tentunya harus ada semacam sanksi-sanksi administrasi yang harus diberlakukan ke masyarakat. Karena bagaimanapun juga kalau kita mengikuti maunya masyarakat sementara kita juga dituntut untuk mengejar target, salah satu yang dilakukan adalah harus ada sanksi administrasi artinya tidak bisa diberikan layanan administrasi ketika belum bisa memperlihatkan sertifikat vaksin.

Jadi seperti itu cara membujuknya. Ada juga reward system doorprize. Kerjasama dengan ada biasa dari INTI, agar masyarakat termotivasi untuk mendatangi pos-pos vaksin yang ada.

Penyebarluasan informasi mengenai Covid melalui apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan?

Terus terang kami kerjasama dengan Kominfo. Terkait dengan media tentunya Kominfo yang berhubungan dengan media sebagai bagian dari Satgas Covid. Jadi informasinya dari kami, dan Kominfo yang menyampaikan ke media. Informasinya itu tentang Gebyar Vaksin, Grebek Vaksin, jadwal-jadwal vaksinasi, itu semua dikemas oleh kominfo untuk disampaikan ke masyarakat melalui media juga. Termasuk juga data update Covid yang masih berjalan sampai sekarang.

Biasanya darimana diperoleh mis dan disinformasi?

Biasanya melalui WA ya, tiba-tiba ada yang masuk, tapi saya kira petugas promkes puskesmas akan segera meluruskan, kalau ada memang hambatan-hambatan terkait informasi yang salah. Mereka kana da WA grup di masing-masing desa. Kelurahan jadi itu tentunya akan tersampaikan hingga ke dusun, rt rw.

Di Satgas juga terdiri dari bermacam latar belakang ya, ada dari Dai Muda, ada dari Media, ada juga dari LSM. Jadi saya kira itu menjadi bagian dari satu jejaring untuk menyampaikan informasi yang ada.

Seperti apa pengaruh dari informasi salah tersebut terhadap tugas-tugas penanganan Covid 19?

Pengaruhnya bagi kami menjadi motivasi ya untuk selalu berada di tengah-tengah masyarakat memberikan edukasi yang sebenarnya segala hal yang berkaitan dengan Mis dan Dis informasi, kamu selalu berupaya meluruskannya.

Jadi kami melakukan edukasi secara langsung dengan pertimbangan kita langsung *face to face* dengan melihat respon langsung masyarakat untuk diberikan pemahaman ya dan itu ada rasa puas. Selain itu juga memang dibutuhkan media, tapi yang sangat efektif juga ya secara langsung, misalnya di pasar-pasar, kita menemukan orang yang selama ini tidak mau divaksin dengan berbagai alasan, kita bujuk-bujuk dengan menyampaikan kalau memang akan dilakukan pemeriksaan kesehatan dulu sebelum divaksin. Sama juga di pasar-pasar, penjual pasar. Jadi pendekatan-pendekatan memang sangat dibutuhkan.

Kami juga biasa menyampaikan di kecamatan-kecamatan. Mengumpulkan ibu PKK, mengundang masyarakat memberikan edukasi terkait pentingnya menjaga prokes, vaksinasi harus dilaksanakan, akhirnya mereka mau mengikuti. Kalau melalui Kominfo, di media agak sulit kami ukur. Kalau secara langsung kami bisa merasakan tingkat pemahamannya.

Jadi dalam hal edukasi, kami melibatkan organisasi profesi, karena dia terjun langsung ke masyarakat. IBI ikatan Bidan Indonesia, Ikatan dokter Indonesia, persatuan perawat. Karena kan mereka melayani langsung ke masyarakat. Kemudian unsur-unsur yang terkait tadi itu ya Kominfo, LSM, Media, PKK juga bermitra.

Jadi alasan utama memilih mereka untuk terlibat, karena kami nilai memiliki potensi ya, kekuatan yang terkait dengan profesinya. Kemudian kalau LSM kan kami lihat dia ada komunitasnya dia bisa menyampaikan tentunya ke masyarakat, kemudian dari Dai Muda kan, bisa melalui khutbah-khutbahnya. Jadi semua punya kekuatan itu sehingga informasi tadi tersebar.

Ada tidak anggaran khusus terkait penanganan Covid 19?

Terus terang untuk penanganannya itu ada, dari refocusing. Tapi terkait penyebarluasan informasi, secara khusus tidak ada alokasinya.

Bagaimana ibu menilai pengaruh dari strategi komunikasi yang dilakukan terhadap penanganan Covid 19?

Kami tentu melihat ada pengaruh ya. Sampai sekarang kan tidak ada lagi kasus penambahan, mudah-mudahan tidak ada lagi. Kemudahan kalau vaksin kan memang sekarang kami lagi genjot. Sekarang Bulukumba kan sudah di level 1 ya. Berarti sudah hijau. Kasusnya memang sudah tidak ada. Tapi bukan berarti masyarakat melonggarkan ya. Karena jangan sampai terjadi lonjakan ketiga dengan adanya kasus Omicron.

| | |
|-------------------|---|
| Nama | : Ikhwan Bahar, S.Pdi, M.Pd |
| Pekerjaan/Jabatan | : Dosen/ Ketua Majelis Dai Muda Bulukumba |
| Hari/Tgl. | : Jum'at, 7 Januari 2022 |
| Tempat | : Warung Kopi Zebatiq Bulukumba |

Apa sih Dai Muda ?

Dai Muda itu adalah, salah satu perhimpunan para Dai-Dai yang kemudian bernaung dibawah MUI. Embrio dari MUI sehingga namanya mirip. Majelis Ulama kemudian Majelis Dai Muda Kabupaten Bulukumba. Ia berdiri pada, sebenarnya kalau secara defacto yuridisnya itu 2017 Januari. Masih baru, ini baru masuk tahap periode kedua karena 4 tahun kepemimpinan, dan Alhamdulillah saat ini Dai Muda sudah merambah ke Kabupaten. Jadi kita sekarang berubah menjadi DPP Dewan Pengurus Pusat, rencananya nanti akan membentuk di Kabupaten Kota dan Provinsi. Pusatnya di Kabupaten Bulukumba. Visi Misinya adalah mencetak sebanyak-banyaknya kader dari milenial untuk menjadi Dai masa depan. Jadi kami fokus hanya ke dakwah saja, tidak mempersoalkan masalah khilafiyah dan seterusnya ya, nda masuk kesitu.

Ada batasan umur yang bias bergabung di dalam Dai Muda?

Yang penting masih jiwa muda lah. Biasanya kan orang kan patok ke 40 (tahun), tapi biasanya 45 masih bias bergabung.

Siapa saja yang tergabung dalam Dai Muda Pak Ustadz?

Sampai hari ini, semua unsur kelompok agama ada. Wahdah Islamiyah, NU, Muhammadiyah, Salafi, bahkan jamaah tabligh tergabung . Jadi kami tidak

melihat dari latar belakang. Yang penting bias berdakwah dan mau berdakwah.

Ada berapa jumlah anggota sekarang ?

Kalau yang ada hari ini 34 pengurus. Tapi dibawahnya itu yang banyak kader. Karena kami mengkader setiap tahunnya itu per angkatan. Sampai angkatan 9.

Dalam satu tahun itu bias beberapa kali pengkaderan?

Selama ini hanya satu kali.

Jadi bisa dibilang Majelis Dai Muda pusatnya di Bulukumba ya?

Iya.

Berarti ada pengurus di tingkat Kecamatan begitu?

Kecamatan belum. Kami lebih focus ke atas bukan ke bawah. Kemarin sudah pelantikan di Bantaeng, insyaallah menuju Selayar.

Mungkin ada spesifikasi di kecamatan-kecamatan tersebar dai mudanya begitu?

Ya dan sebenarnya kami jangkauannya sesuai anggaran dasar itu memang lingkup kabupaten tapi hari ini lebih dari kecamatan bahkan turun ke desa-desa.

Ada tidak, kegiatan rutin yang dilakukan setiap bulan untuk bertemu dengan semua anggota-anggota?

Banyak. Ada kegiatan rutin mingguan ada rutin harian, ada bulanan. Harian itu yang takziah, karena banyak yang masuk ke kami minta penceramah, khutbah jumat, kalau yang instansi juga ada. Kayak tadi pagi ini, Kantor Pengadilan Negeri, yang lalu di Kejaksaan Negeri, di Lapas, di desa-desa juga. Beberapa desa kerjasama MoU dengan kami.

Kerjasamanya dalam bentuk apa itu pak?

Kajian keagamaan. Bahkan ada beberapa desa yang kami tindaklanjuti lebih daripada pengajian itu mengaji khusus orangtua. Jadi mulai dari Iqro 1.

Jadi memang kegiatan itu selalu rutin dilakukan Dai Muda untuk bertemu masyarakat secara langsung ya?

Iya. Dan kami menggunakan 3 item. Yang verbal, bertemu langsung, kemudian melalui media. Karena kami juga mempunyai media online Bulukumba Pos dan kami sudah sejak awal berdiri sudah kerjasama dengan Radio Cempaka Asri di Bulukumba. Sehingga aksesnya ada yang dapat dari radio ada yang dapat dari media online nya, dan ada yang langsung ke masyarakat.

Selanjutnya yang ingin kami ketahui adalah seperti apa peran Dai Muda khususnya dalam penanganan Covid 19? Saya mendapatkan informasi bahwa pemerintah itu melibatkan Majelis Dai Muda khususnya dalam penyebaran Informasi dan juga terkait edukasi kepada masyarakat. Seperti apa sih bentuk kerjasamanya dan apa saja yang sudah dilakukan?

Terkait dengan itu sejujurnya di Bulukumba ini kan banyak lembaga agama ya. Ada macam-macam lah. Tapi yang kami syukuri adalah diantara sekian banyak itu kami yang dipilih. Saya berprasangka baik mungkin karena di awal-awal corona kami sudah terlibat, tanpa dimotivasi pemerintah. Bisa kami nanti kirimkan dokumentasinya. Kami turun ke pasar-pasar, ke Cekkeng, banyak daerah kami datang ke pasar-pasar di pasar sentral ya, untuk anjuran menjaga jarak, menghindari kerumunan, pakai masker. Itu awal corona. Belum ada yang namanya Satgas itu kami sudah turun.

Kemudian setelah itu, kami dilibatkan oleh Satgas di periode Andi Sukri kemarin untuk bersama-sama menghimbau masyarakat dalam hal waktu masjid ditutup, kemudian tidak boleh ada kerumunan, kami juga sampaikan bahwa dalam kondisi darurat, dalam agama darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang. Cuma ada tambahannya bahwa agama mengajarkan juga dalam hal fiqih, bahwa darurat itu diukur dengan kadarnya. Maksudnya begini jika ternyata shalat menggunakan masker itu lebih berfaedah lebih menjaga diri itu boleh, jika menjaga jarak itu kemudian menghindari penyakit boleh tidak apa-apa. Karena itu, tidak membatalkan shalat termasuk tidak rapatnya shaf. Itu hal-hal yang kami sosialisasikan ke masyarakat sehingga belakangan ini di masa periode bupati sekarang kami tetap masuk dalam Satgas Kabupaten Bulukumba, tetapi lain dengan yang awal-awal. Dulu kan masker, masjid, sekarang itu lain lagi tugas kami. Ya itu tadi, menangkal berita-berita hoax terkait dengan vaksinasi sehingga sebelum keluar kami sampaikan bahwa Dai Muda harus jadi contoh, Dai Muda harus divaksin. Sehingga beberapa kali vaksinasi di Islamic Center Dato Tiro dan beberapa masjid itu kami terlibat mengajak masyarakat vaksin.

Kemudian yang kedua bahwa, ini vaksin adalah bagian daripada usaha atau ikhtiar ya. Walaupun tidak ada yang menjamin bahwa kalau sudah vaksin tidak kena tapi namanya usaha. Sama dengan berobat. Tidak ada menjamin kalau kita ke dokter pasti sembuh. Tapi kan sama. Ini yang kami sampaikan ke masyarakat. Bahwa berikhtiar, berikhtiar, berikhtiar. Jangan menyatakan ini haram ini haram. Tidak mungkin mengeluarkan label halal untuk vaksin kalau itu ternyata tidak benar. Mari percaya pada berita dan hindari hal-hal hoaks. Kadang-kadang hanya satu orang yang pingsan habis divaksin tapi itu yang diposting beribu-ribu kali. Sehingga masyarakat selalu saya ingatkan hati-hati dengan hoaks. 1 peluru polisi hanya mampu menembus 1 kepala. Tapi 1 berita hoaks mampu merusak ribuan kepalanya orang. Cara berpikarnya orang. Itu yang kami sampaikan kebawah. Makanya kemarin melalui satgas keterlibatan kami, kami sampaikan pak Bupati, Pak Kadis Kesehatan, masuki madrasah, masuki pesantren jangan tunggu mereka keluar, karena mungkin ada hal-hal yang tidak bisa snatrinya keluar. Kita yang datang. Sehingga muncullah program grebek. Mendatangi pesantren mendatangi madrasah untuk vaksinasi. Dan Alhamdulillah itu direspon dengan baik.

Jadi edukasinya lebih banyak secara langsung ke masyarakat, kayak itu tadi ke pasar, meskipun yang saat ini dilakukan informasinya itu lebih banyak tentang menangkal berita-berita hoaks?

Ya verbal. Kami lebih banyak lewat takziah. Takziah ini kan hamper tiap malam jadi itu memang masyarakat banyak di orang meninggal dunia. Disitu kami sampaikan tentang masalah vaksin. Apalagi kalau ada pak desa tolong bantulah pemerintah kita vaksinnya ikhlas karena Allah. Bahkan saya sampaikan saya juga sudah divaksin. Kadang dalam takziah saya keluarkan kartu hasil vaksin supaya masyarakat lebih yakin.

Jadi Dai yang bernaung dalam Dai Muda memang sudah dibekali informasi tentang hal tersebut, dan itu istilahnya ada tidak pembekalan dalam pertemuan khusus untuk mengupdate kembali informasi?

Iya. Lebih banyak semua informasi yang dari satgas dan perkembangan-perkembangan. Itu yang masuk dalam grup. Makanya grup wa itu menjadi sesuatu yang wajib bagi Dai Muda. Mungkin dianggap grup biasa, tapi ini beda. Kami di Dai Muda punya aturan. Anggota yang keluar dari grup karena merasa terganggu itu langsung dipecat. Tidak main-main. Langsung dikeluarkan dari keanggotaan. Makanya teman-teman sangat aktif. Semua informasi bersumber disitu.

Kalau diantara teman-teman itu pada saat ke lapangan ketemu dengan masyarakat, ada nda isu-isu yang hoaks itu tadi yang kita temukan?

Banyak. Contoh, ketika awal vaksin ternyata masyarakat memahami bahwa yang dikasih ke Pak Jokowi itu bukan vaksin. Itu vitamin. Itu satu. Yang kedua, bahwa kalau vaksin itu ini yang paling parah, kalau di vaksin orang, umur itu sisa 2 tahun dan itu bukan satu dua orang. Ratusan orang yang kami dengar. Nda usah vaksin. Mati ko. 2 tahun umurmu. Ketiga, bahwa vaksin yang beredar itu tidak diterima di luar negeri. Walaupun memang ada sih benarnya ya, tapi kan masih negosiasi pemerintah terkait sinovac. Tapi kan mereka tidak pernah memahami bahwa vaksin itu banyak macamnya. Ada moderna ada sinovac, tapi mereka pukul rata. Vaksinnya Indonesia tidak cocok, nda bisa dipake umrah. Sehingga nda ada mau mereka. Kemudian berikutnya bahwa kalau orang sudah divaksin tidak bisa lagi hamil, perempuan. Dan itu kami dengar dengan telinga. Kami tidak perlu tanggap. Kami sampaikan ajal itu Allah yang takdirkan. Sebelum ada vaksin juga banyak orang meninggal dunia. Persoalan penyakit itu Allah yang takdirkan. Gak usah, anak itu rizki dari Allah. Bukan gara-gara divaksin atau tidak. Nda ada itu pemerintah yang mau membunuh rakyatnya. Itu yang kami berikan pemahaman kepada masyarakat.

Kalau dalam proses awal dulu yang kita bilang sebelum pemerintah membentuk satgas kita sudah lakukan, ada nda yang kita temukan mis dan dis informasi tadi terkait covid pada tahap awal?

Yang ada pada saat itu justeru cueknya yang lebih banyak, karena waktu itu, bayangkan belum masuk kesitu. Kami masih sosialisasi bagi-bagi masker dan itu inisiatif kami suruh jahit. Kami modali dan bawa ke pasar-pasar bagi-bagi masker. Itu dulu, target utamanya yang penting mereka mau pakai masker.

Pada saat kita mendapati informasi salah tersebut kita bisa melihat nda, biasanya kalangan-kalangan apa itu yang mudah sekali terpapar informasi salah itu?

Kalau di persentasi 10 persen dari pihak terpelajar ya. Saya mohon maaf ada orang yang saya anggap terpelajar, tinggi pendidikan tapi justeru penebar hoaks. Karena dia menolak dengan berbagai macam alasan. Selebihnya itu lebih banyak para masyarakat yang kita kan bisa menilai seseorang akses informasinya gimana ya. Dari handphone saja bisa dinilai. Kalau hp communicator dikasih dengan senter, berarti hanya tv yang ditonton. Biasanya yang begini sangat mudah, rentan, apalagi orang-orang tua yang

dapat dari anaknya, anaknya juga dapat dari facebook, facebook juga ini abal-abal yang dibaca seperti itu modelnya. Atau nonton beritanya sepotong-sepotong sehingga itu lebih banyak kalangan petani, pekebun, kalangan bawah.

Apa karena masyarakat yang kita temui pada model-model pertemuan takziah kan biasanya usia-usia dewasa begitu Pak Ustadz?

Ya betul. Saya teringat, kenapa itu terjadi. Saya masih kecil waktu ada dulu namanya KB. Ibu-ibu dipaksa untuk dipakaikan spiral dan itu semua suami menolak itu KB, suntikan apa, nda mau di KB isterinya. Sekarang justeru mereka minta KB. Seperti itu modelnya itu. Awal-awalnya. Tapi nanti kedepan mereka juga akan paham manfaat daripada vaksin. Masyarakat kenapa nda mau divaksin, apa sajalah alasannya pokoknya tidak mau divaksin. Ada tong yang begitu ada sekian persen yang begitu. "Saya nda mau divaksin. Biar ma mati kalau memang mati, kalau nda dikasih bantuan pemerintah, ya nda usah".

Jadi memang rata-rata orang yang kita temui itu dapat informasi bukan hanya melalui gadget ya, kalau bukan dari gawai maka itu bisa jadi dari televise atau orang terdekat ya?

Iya betul.

Saya tertarik juga tadi, waktu kita bilanng kita berinisiatif untuk menyediakan masker dan membagikan. Darimana itu sumber anggarannya?

Kalau sumber anggarannya itu dari Dewan Pembina. Dewan Pembina itu kami ada beberapa tokoh-tokoh termasuk dari anggota kepolisian secara individu membantu, kami cetak dulu ada sekian sekian ratus, teman penjahitnya orang cacat. Jadi secara otomatis terbantu juga. Kami bagi sekian ratus itu murni infak. Bukan dari bantuan pemerintah.

Kalau kerjasama dengan rumah-rumah ibadah di seluruh kecamatan, ada tidak secara rutin pesan-pesan khusus yang harus selalu disampaikan ke masyarakat?

Sesuai amanat dari satgas ke kami secara khusus tidak. Tapi lebih banyak banyak selipan, maksudnya bagaimana meramu diawal atau diujung ceramah menyampaikan tentang itu. Karena kami kan memang bukan petugas resmi. Sehingga kami tidak terlalu memahami awalnya, tapi bagaimana meramu mengarahkan materi ceramah nanti ujungnya kena

kesitu. Contoh misalkan kami takziah kematian. Bahwa musibah itu bukan hanya kematian anggota keluarga tapi musibah terhadap penyakit, penyakit yang menyeluruh, pandemic, termasuk corona kita dapat hari ini, masuk kesitu. Jadi diarahkan lari kesitu.

Lebih banyak unsur pemerintah apa yang biasanya majelis dai muda bekerjasama?

Kami lebih banyak ke Desa

Kalau dari pemerintah kabupaten sendiri, OPD begitu dengan siapa biasanya berkoordinasi atau mendapatkan informasi update terkait covid?

Langsung ke Diskominfo. Kan kita orang media dan di satgas kan update informasinya sehingga kami langsung dapat informasinya dari situ. Ada grup satgas.

Baik Pak Usradz. Terimakasih atas waktunya. Semoga teman-teman Dai Muda sehat selalu.

| | |
|-------------------|---|
| Nama | : Drs. K.H. Tjamiruddin, M.Pdi |
| Pekerjaan/Jabatan | : Ketua Umum MUI Kabupaten Bulukumba |
| Hari/Tgl. | : Sabtu, 8 Januari 2022 |
| Tempat | : Kediaman Pribadi di Kelurahan Kasimpureng |

Bagaimana pandangan bapak mengenai Mis dan Dis Informasi, atau yang lebih populer dikenal dengan Hoaks di masa pandemic Covid 19 ini?

Hoaks itu banyak beredar di masyarakat. Ada yang mengatakan ini tidak boleh, ini haram, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Covid ini kurang. Karena dikatakan saya dapat di HP begini-begini, seperti itu, terkait vaksin ya, itu haram. Padahal sebenarnya itu ikhtiar namanya dalam agama. Pada saat wabah kolera di Mekkah, itu Nabi menganjurkan tidak boleh ada yang masuk Masjidil Haram. Bahkan untuk pelaksanaan haji ditutup. Jadi Nabi sendiri mengatakan tidak boleh, karena wabah penyakit itu. Di Mekkah saja, jangankan masa Nabi, sekarang ini kalau ada orang yang naik haji atau umrah, yang menurut dokter kalau penyakitnya bisa menular itu dikarantina. Itu merupakan satu ikhtiar supaya tidak menular kepada orang lain. Pernah satu waktu Nabi, ada satu kampung disitu mewabah penyakit, Nabi

menganjurkan, jangan ada orang yang masuk di Kampung itu. Jadi apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah adalah ketentuan dan fatwa Majelis Ulama Pusat. Itulah yang kita bikin edaran berdasarkan fatwa Majelis Ulama Pusat dari hadits-hadits dan dalil-dalil menurut syariat Islam. Cuma kadang masyarakat kurang memahami itu. Apalagi muncul yang namanya hoaks. Seperti vaksin. Vaksin itu menurut fatwa Majelis Ulama dibolehkan. Bahkan menurut hukum Islam, sekiranya ada seorang yang sakit keras kemudian diperiksa oleh tim ahli dari medis, kemudian tim medis ini berpendapat sejujurnya bahwa ini orang bisa sembuh dari penyakitnya kalau makan daging babi. Yang haram ini, kembali wajib hukumnya tapi sekedar untuk obat, wajib hukumnya ia makan karena itu ikhtiar. Ya ini yang tidak dipahami oleh masyarakat. Jadi yang haram saja bisa wajib pada suatu saat kalau dalam keadaan darurat. Covid ini kita sedang berada dalam kedaruratan. Jadi hal-hal seperti inilah sebenarnya yang perlu disampaikan ke masyarakat dan saya waktu ada pertemuan dulu Majelis Ulama di Makassar, saya kasih tau. Saya minta tolong pemerintah bisa mencegah ini hoaks-hoaks. Karena pemerintah ini yang berwenang untuk mengatur ini, supaya tidak muncul lagi di media. Itulah yang diharapkan, sehingga barangkali saya sangat setuju dengan tulisan adinda ini untuk memberikan pengertian di masyarakat. Karena memang di masyarakat ini masih kadang-kadang tidak memahami. Ini saja tentang vaksin ini, saya sampaikan kepada Pak Bupati, Kapolres, Pak Dandim, semestinya kita harus menurunkan penyuluh-penyuluh agama dari Kementerian Agama untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat, bahwa vaksin itu tujuannya dalam bahasa agama ikhtiar, berupaya untuk menghindari. Jadi bukan vaksin ini sebagai obat, tapi vaksin ini adalah ikhtiar untuk memberikan kekebalan. Jadi Pak Bupati kemarin mengatakan iya perlu kita adakan pertemuan lagi kasih tau kepala dinas, kemudian kita gerakkan ini para muballigh untuk mengikuti vaksin. Dan saya juga menyampaikan, barangkali sudah diubah polanya dan ini sudah jalan. Saya minta diubah, barangkali dari Kodim, dari Polisi, dari kesehatan, biarlah kita ini bekerja untuk umat, door to door. Jadi didatangi di rumahnya. Karena banyak orang yang tidak datang ke tempat vaksin itu, karena perasaan takut karena adanya hoaks, Bahwa begini-begini, orang sudah divaksin langsung mati, pingsan. Tidak semua. Justeru itu, ada screening sebelumnya dari dokter. Ada orang sudah mau sekali divaksin tapi dokter mengatakan jangan. Ada penyakit bawaan, Seperti itu. Ini yang tidak dipahami oleh masyarakat. Kemudian seperti misalnya anjuran untuk protokol kesehatan. Itu dalam agama dibenarkan. Majelis ulama itu membenarkan misalnya pakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. Itu semua upaya dan

merupakan ikhtiar untuk menghindarkan dari hal-hal kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik. Kemudian, kalau saya bicara di masyarakat itu ditambah satu. Yaitu harus ditambah dengan doa.

Biasanya dimana bapak bertemu masyarakat dan menyampaikan itu?

Di Masjid atau kalau ada acara-acara misalnya Majelis Taklim. Saya diberikan waktu untuk sambutan. Dan kalau di Bulukumba ini, semua Muballigh kalau bicara mulai tahun 2019 sampai tahun 2021 itu minta tolong disinggung biar sedikit. Apakah di khutbah dan sebagainya.

Apa yang melatarbelakangi MUI Bulukumba mengeluarkan edaran terkait Covid 19?

Dari Pusat. Karena kita yakin bahwa ulama-ulama di Majelis Ulama Pusat itu kalau dibanding dengan kita, jauh berbeda. Dia itu ahli-ahli semua. Ahli agama. Dia itu duduk bersama. Tidak sekedar membikin. Itu dibuatkan satu pertemuan khusus, kemudian membuat fatwa, membuka kitab-kitab ya hadits-hadits yang mana yang berhubungan. Yang garis besarnya itu adalah vaksin itu adalah merupakan satu ikhtiar untuk menjaga diri, menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan tentang virus-virus.

Biasanya informasi hoaks seperti apa yang bapak dengar secara langsung kalau sedang bertemu dengan masyarakat?

Kadang-kadang masyarakat mengatakan kalau vaksin itu mengandung babi. Yang kedua itu adalah upaya-upaya orang-orang tertentu untuk meraih keuntungan.

Kalau penolakan masyarakat tentang himbauan beribadah di rumah biasanya seperti apa?

Jadi tergantung dari tokoh agama untuk menyampaikan. Dulu disini, di Masjid Raya, itu agak keras pertamanya. Tapi setelah datang memberikan penjelasan, akhirnya mereka mengerti. Termasuk dalam hal menjaga jarak shaf.

Berarti memang tahapannya dimulai dari pengurus Masjidnya dulu ya, karena mereka yang tidak mau menutup ya?

Ya. Pengurus Masjidnya saja. Jadi kita ini harus memberikan motivasi kepada pengurus-pengurus Masjid. Itu kita sudah lakukan. Undang mereka dala pertemuan di MUI. Itupun masih ada yang tidak menolak secara kasar. Tapi dia tetap membuka. Utamanya yang di desa-desa. Karena dia ada yang

berpendapat bahwa, masa beribadah dilarang. Karena katanya ibadah ini perintah Allah. Masa Allah mau melihat-lihati kita begini. Tidak seperti itu. Di Makkah itu sudah beberapa kali ditutup perhajian gara-gara penyakit. Mulai sejak zaman Nabi.

Unsur pemerintah yang paling intens melakukan koordinasi dengan MUI itu darimana?

Dari Dinas Kesehatan dengan Kominfo. Itu selalu meminta pendapat, kemudian dia sebarkan. Jadi Kominfo itu juga sangat membantu. Dan semua kegiatan-kegiatan itu dia sampaikan ke saya. Pasti ada masuk ke WA saya. Kalau bisa saya berikan penjelasan, maka saya jelaskan. Biar hasil-hasil capaian itu ada masuk. Kami juga masih dilibatkan dan hadir dalam pertemuan-pertemuan satgas.

Apakah MUI juga menjalin kerjasama dengan media dalam upaya penyebaran informasi mengenai kebijakan Covid khususnya yang berkaitan dengan isu agama?

Pernah. Kami biasa dihubungi dengan media untuk wawancara. Malah fatwa itu kita sampaikan supaya fatwa itu dimuat di Media. Fatwa bersama Majelis Ulama dengan Pemerintah. Kalau di Bulukumba ini semua tanda tangan. Bupati, Majelis Ulama, Polres, Kodim, dengan Pengadilan. Yang diistilahkan himbauan bersama.

Baik Bapak. Terimakasih atas waktunya. Saya mohon izin kalau boleh datang berkunjung ke kantor MUI untuk bisa melihat dan mengambil data mengenai himbauan yang tadi bapak sampaikan.

Oya boleh. Nanti datang saja menemui Bapak Abdul Hakim, beliau sekretaris saya di MUI.

| | |
|-------------------|--|
| Nama | : Saiful |
| Pekerjaan/Jabatan | : Jurnalis/Ketua JOIN Bulukumba |
| Hari/Tgl. | : Rabu, 11 Januari 2022 |
| Tempat | : Warung Kopi Terang Belakang, Bulukumba |

Seperti apa bentuk keterlibatan JOIN dalam upaya penanganan COVID 19 yang dilakukan Pemerintah?

Kami ada di grup Whatsapp Satgas Covid. Didalamnya ada beberapa pejabat pemerintah disini. Kapolres, Dandim, Ketua DPRD, ada juga unsur Tokoh Masyarakat disitu Ketua MUI.

Bisa dijelaskan terlebih dahulu mengenai JOIN?

Jadi JOIN di Kabupaten Bulukumba itu pertama kali hadir di tahun 2018. Itu di penghujung tahun. Salah satu organisasi profesi jurnalis dan teman-teman ada sekitar 30 orang lebih jrnalis media online. JOIN kan bukan organisasi Media Online.Tapi organisasi jurnalisnya. Jadi dalam satu perusahaan media, bisa jadi ada lebih dari satu jurnalisnya yang tergabung. JOIN kan kepanjangannya Jurnalis Online Indonesia. Saya sendiri adalah ketuanya, kemudian sekretaris Riskandi Nur. Bendahara Dirman. Kantor Pusatnya itu di Jakarta. Visi Misi kami itu sebagai wadah berkumpulnya jurnalis online yang bekerja sesuai dengan UU Pers dan kode etik jurnalis. Kemudian mengikuti perkembangan saat ini yang berbasis digital. Jadi selain kebutuhan kececepatn Informasi, tapi teman-teman dituntut juga untuk cover both side. Karena itu salah satu kelemahan di era yang serba cepat ini. Begitu dap;at peristiwa langsung dibuat dalam satu produk jurnalistik tapi di sisi lain tidak memperhatikan itu tadi, perimbangannya. Kemudian Visi yang utama adalah bagaimana melawan itu hoaks. Di era yang cepat ini, hoaks menjadi rawan.

Ada tidak semacam program kerja yang khusus dilakukan oleh JOIN khususnya dalam melawan hoaks?

Jadi salah satu program terkait dengan melawan hoaks itu tadi, seperti forum-forum dialog. Seperti yang di Sebatiq itu hari Kak. Dengan menghadirkan unsur pemerintah, kemudian dari pihak kepolisian, dan juga DPRD, peserta itu kita undang semua kalangan lintas organisasi termasuk masyarakat juga. Kemudian terakhir ini kami melakukan pelatihan jurnalistik di media center Kominfo. Itu bekerjasama dengan Kohati Bulukumba. Tujuannya yang pertama memahami dasar-dasar jurnalistik tapi salah satu poin utamanya yang ditekankan itu, tidak terlepas dari yang tadi itu juga, hoaks. Makanya kami hadirkan juga Kanit Tipiter POlres Bulukumba sebagai Narasumber. Jadi pesertanya ada mahasiswa, ada dari PPDI, yang penyandang disabilitas. Sebenarnya kami sering melaksanakan dialog, pernah juga dilakukan bersama Kominfo. Saat itu dilakukan secara tatap muka karena masa pandemic, Cuma memang pesertanya dibatasi.

Kalau diantara teman-teman JOIN pernah tidak secara khusus membahas mengenai isu-isu Hoaks yang sedang populer di masyarakat?

Kalau isu-isu lokal tidak pernah ji kak. Yang terakhir ini kan tentang vaksinasi, mulai ada dokter yang meninggal itu kan. Tapi setelah itu tidak ada lagi. Rata-rata yang masyarakat konsumsi itu dari luar. Biasanya dari facebook. Jadi ada suatu ketika dialog juga di Kominfo, yang dilaksanakan juga dengan Kominfo, saat itu yang hadir Ibu Kadis Kesehatan dengan Dokter Amrullah. Ada beberapa isu dari luar yang dikonsumsi masyarakat, tentang hoaks itu tadi.

Kalau Join pernah tidak ada kerjasamanya dengan pemerintah?

Pernah untuk vaksin. Join kerjasama dengan Pemkab di Rujab Wakil Bupati melakukan vaksinasi untuk Jurnalis dan Masyarakat Umum. Kami terlibat sebagai penyelenggara.

Menurut anda, masyarakat cukup terdampak tidak dengan isu-isu hoaks itu tadi?

Kalau saya menilai, ini yang harus dijaga ini yang isu luar. Kalau isu lokal ini saya kira tidak terlalu berdampak. Buktinya sekarang, ada peningkatan signifikan, vaksinasi di Bulukumba. Kalau kita turun ke lapangan, hampir semua masyarakat yang ditanya, sudah vaksin. Jadi memang menggiring opini penting, kalau opininya baik, masyarakatnya juga ikut bersemangat. Tapi kalau masyarakat disuguhi terus dengan opini-opini yang menyesatkan, tentu itu juga berdampak. Tapi di Bulukumba ini Alhamdulillah untuk isu-isu lokalnya kurang ji Kak.

Bergabungnya Join dalam grup Satgas, ada tidak penyampaian sebelumnya mengenai alasan untuk melibatkan Join dalam grup tersebut?

Saya tidak pernah disampaikan diawal, tapi Pak Kadis bilang pada waktu itu, kita masuk Tim Satgas ya. Di grup itu saya liat update informasinya. Saat ini terkait vaksinasi di grebek vaksin, vaksinasi di daerah-daerah wilayah puskesmas. Saya masuk di grup itu sekitar dua bulanan, saat gencar-gencarnya vaksin. Tapi sejujurnya saya tidak paham apa peranan yang diharapkan untuk saya lakukan.

Apakah menurut perspektif anda selaku yang mewakili Join, Pemerintah sudah cukup baik dalam melakukan upaya penyebarluasan informasi mengenai Covid 19?

Kalau saya lihat, dulu waktu awal-awal kan masyarakat masih ada ketakutan ya, tapi setelah berjalan 2 tahun, sudah mulai bisa menerima dan untuk

vaksin itu sendiri masyarakat juga menyadari kalau itu adalah hal yang harus dilakukan. Jadi kalau di Bulukumba ini, saya menilai pemerintah sudah maksimal melakukan sosialisasi, kemudian melakukan berbagai cara strategi untuk meningkatkan capaian target vaksinasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten. Dan di akhir tahun kemarin, bahwa berdasarkan data Dinas Kesehatan sudah mencapai target vaksinasi. Berarti pesan yang disampaikan oleh pemerintah bisa diterima masyarakat. Bahwa vaksin itu adalah suatu kebutuhan yang harus dilakukan.

Ada tidak kesulitan untuk memperoleh informasi?

Kalau saya lihat, selama teman-teman jurnalis selama melakukan konfirmasi, saya kira Pak Kadis ini selaku Jubir Satgad Covid selalu terbuka . Bahkan sering share data-data terkait Covid dan vaksin ini di grup-grup media center humas dan kominfo.

Menurut anda mengapa masyarakat bisa mendapatkan informasi yang tidak benar?

Kalau saya melihat ini tadi Kak, facebook kan jangkauannya sampai ke pelosok. Sementara pesan pemerintah belum tentu sampai ke masyarakat. Jadi harus ada perimbangan informasi antara pesan pemerintah dengan isu-isu yang rawan untuk menyesatkan itu. Kalau bisa itu dicounter agar tidak melintas di sosial media. Nah disinilah tugasnya pihak yang terkait untuk mengcounter itu.

Pernah tidak ada penyampaian khusus dari Satgas untuk menangkal isu-isu hoaks itu tadi?

Ya itu tadi, melalui dialog yang dilakukan dan pelatihan untuk menangkal hoaks. Jadi ternyata, yang melintas sosial media itu banyak orang yang berperan disitu, selain didalam pihak kepolisian misalnya, ada lagi apa namanya, orang yang punya peran vital, yaitu admin grup. Misalnya grup-grup yang ada di Bulukumba ini, ada beberapa gurp FB itu sangat banyak membersnya. Ada info kejadian Bulukumba, ada Info Warga Bulukumba, dst. Itu bisa juga dilihat, bagaimana perkembangan di Grup. Admin-admin grup.

Baik, terimakasih atas waktu dan penjelasannya.

| | |
|-------------------|--|
| Nama | : DR. H. Abd. Hakim Bukhari, M.Pd |
| Pekerjaan/Jabatan | : Ketua Tanfidziyah NU/ Sekretaris MUI Bulukumba |
| Hari/Tgl. | : Rabu, 12 Januari 2022 |

| | |
|--------|--------------------------------|
| Tempat | : Kantor PLH Kemenag Bulukumba |
|--------|--------------------------------|

Organisasi Islam apa yang bernaung dibawah MUI?

Itu MUI sebenarnya, dia menaungi seluruh ormas islam. Jadi induk semua ormas islam ada di Majelis Ulama. Jadi yang bergabung di Majelis Ulama itu person-personnya itu ada dari Muhammadiyah, NU ada, ormas lain pun ada. Jadi kumpulan dari ormas ya di MUI itu.

Jadi apa saja upaya yang dilakukan MUI yang terkait dengan penanganan Covid 19 khususnya terkait bidang kemasyarakatan dan Agama?

Kami selalu membuat edaran-edaran. Termasuk membuat edaran terkait Pilkada juga. Bagaimana agar masyarakat menjaga situasi yang kondusif, itu ada. Bahkan kami juga membuat khutbah seragam untuk memberi edukasi masyarakat kaitannya dengan berbagai hal. Termasuk itu vaksinasi. Kita juga bikin semacam edaran atau sosialisasi kaitannya dengan vaksin Sinovac. Bahwa ini berdasarkan fatwa majelis ulama tahun 2021 itu, vaksin sinovac itu dianggap halal dan bersih. Termasuk di Majelis Ulama itu, diberikan wewenang untuk memberi rekomendasi warga Negara Indonesia yang mau keluar negeri. Karena harus di screening, jangan-jangan dia pergi belajar justeru menjadi bagian dari orang yang merongrong pemerintahan. Kan biasa begitu, ya direkrut oleh ISIS dan semacamnya itu.

Termasuk kita prakarsa seluruh ormas untuk membuat maklumat. Kita undang BKPRMI, semua ormas-ormas di Bulukumba diundang oleh Majelis Ulama untuk melakukan penguatan terhadap kebijakan pemerintah tentang Covid 19. Jadi kami sangat sering melakukan pertemuan-pertemuan baik tatap muka maupun virtual.

Bagaiman model penyampaian himbauan dan edaran yang dikeluarkan oleh MUI Bulukumba?

Penyampaiannya itu, Majelis Ulama kan mempunyai sayap ke ormas-ormas. Yang pertama kita edarkan melalui online, melalui WA sehingga menyebar sangat cepat. Kemudian yang kedua, para pengurus Ormas yang tergabung dalam Majelis Ulama itu kita kasih manualnya untuk disampaikan. Kemudian kita bekerjasama dengan kementerian agama yang punya sayap sampai ke akar rumput kebawah ada imam, penyuluh, penghulu, itu langsung sampai kebawah itu. Jadi memaksimalkan grup whatsapp. Kemudian kerjasama

dengan instansi-instansi yang punya sayap sampai kebawah, kementerian agama kan punya KUA, di KUA itu menaungi imam, sampai iman masjid.

Biasanya informasi seperti apa yang disebarluaskan?

Diantaranya itu dihimbau masyarakat jangan termakan oleh hoaks yang mendiskreditkan pemerintah dalam hal-hal tertentu. Kemudian kaitannya dengan Covid, termasuk yang agak berat itu kemarin kaitannya dengan penutupan Masjid sementara. Cuma di edarannya MUI saat itu, karena saat itu masih zonasi, memang daerah-daerah yang jadi sentra persinggahan itu ditutup sementara. Tapi sementara yang bersifat local itu masih ada sedikit kelonggaran untuk tidak menutup. Makanya beberapa ormas itu dia tutup. Wahdah itu bahkan sebulan penuh dia tutup.

Jadi disaat awal itu ada penolakan ya. Tapi setelah kita berikan pemahaman berdasarkan kaidah-kaidah ushul fiqih, akhirnya juga bisa diredam. Jadi memang penolakannya itu ke pemerintah, kenapa ditutup. Tapi kemudian kami jelaskan bahwa ini demi keselamatan jiwa manusia. Jadi ini harus dihadapi bersama, memaksa kita untuk bersatu padu, tokoh agama, pemerintah, dan tokoh masyarakat tentu sama-sama membendung ini laju Covid 19. Jadi memang edaran mengenai penutupan masjid itu sempat ditolak oleh sebagian pengurus masjid itu sendiri. Masyarakat itu kan kadang gampang diprovokasi tanpa memahami maqoshid syariah. Jadi pengurus Majelis Ulama itu memang harus memahami ushul fiqih. Jadi gambarannya begonia turan atau perintah agama itu dalam rangka menjaga lima dasar. Yang pertama itu menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan, yang kelima menjaga harta benda. Nah dalam rangka menjaga jiwa maka kita disuruh berobat atau jangan bunuh diri. Kalau kita tau bahwa disana ada bahaya dan kita menjerumuskan sama halnya dengan kita tidak menjaga jiwa kita. Kemudian yang kedua, shalat itu bisa digantikan di rumah, artinya tanpa mengurangi nilai ibadah kita. Artinya andai pun orang tidak shalat di masjid, maka dia tetap gugur kewajibannya jika di rumah. Apalagi kalau ada sesuatu yang berbahaya untuk dirinya. Seperti itu penjelasannya ke masyarakat. Seperti halnya dalam rangka menjaga akal. Agama itu melarang minum-minuman keras, sabu-sabu, narkoba, itu untuk menjaga akal agar sehat.

Jadi itulah, MUI kan anggotanya dari seluruh ormas islam yang ada di Bulukumba. Jadi mereka person, individu yang dianggap memiliki kompetensi di bidang tertentu. Contoh misalnya bidang fatwa. Itu kita ambil orang yang memang memahami hukum islam. Bahkan itu dari Mesir, dari pesantren 6

tahun baru ke Mesir. Jadi kita tidak melihat dari ormas mana, tetapi kompetensinya. Seperti Pak Yusuf Shandy kita rekrut. Di bidang pendidikan misalnya kita ambil yang memang aktif dikeagamaan, trus di bidang pendidikan dia juga aktif. Misalnya Drs. H. Sahiruddin. Jadi tidak mutlak harus dai ormas islam. Bahkan di Jakarta itu banyak dokter yang untuk penelitian produk halal dan makanan.

Jadi ketika keluar fatwa dari Pusat sebagai yang berwenang mengeluarkan, langsung kita tindaklanjuti dengan edaran.

Apakah memang ada penyampaian secara khusus oleh pemerintah Daerah kepada MUI Bulukumba, untuk terlibat dalam penanganan Covid 19?

Ya memang meminta. Makanya setiap ada pertemuan itu kami sering diundang. Bahkan Vidcon dengan panglima TNI bersama Bupati pada saat itu masih Andi Sukri.

Jadi seperti apa penekanan mengenai pesan yang diharapkan akan disampaikan oleh imam-imam dan penyuluh agama itu tadi?

Artinya kita menyampaikan kepada mereka agar menyampaikan berita-berita yang memang punya dasar yang jelas, dan informasi yang benar, dan menyampaikan dengan cara yang sejuak. Tidak membuat panic, kana da yang kayak menakut-nakuti mencekam. Makanya perlu disampaikan secara bijaksana, sehingga warga tetap tenang dan bisa yakin bahwa insyaallah kita akan keluar dari keadaan ini. Karena kalau kita takut-takuti juga nanti imunnya turun, kalau turun kan gampang kena penyakit. Makanya ada istilah yang kita keluarkan dari Majelis Ulama 3I. Iman, Aman, Imun. Jadi kalau kita yakin bahwaini adalah sesuatu yang sudah ketentuan dari Yang Maha Kuasa, itu kekuatan iman itu yakin, maka kita merasa aman, kalau kita merasa aman tidak stress, maka imun akan naik.

Isu Hoaks apa sih yang paling menarik perhatian di kalangan MUI?

Hoaks yang paling susah dibendung dan banyak dipertanyakan ketika kami dipanggil oleh Radio Suara Panrita Lopi, itu adalah beberapa pernyataan-pernyataan dari ahli virus sendiri yang berbeda pendapat. Itu yang kami tanyakan karena perlu dijelaskan se jelas-jelasnya kepada masyarakat karena beberapa tokoh seperti mantan menteri, bahkan ahli virus, dan beberapa dokter yang menyatakan bahwa virus ini tidak berbahaya. Ini adalah informasi yang bertolak belakang dengan yang disampaikan pemerintah. Ini yang menyusahkan kita. Karena yang berbicara ini juga

ahlinya. Inilah yang susah kita bending karena mereka juga ahlinya. Bahkan ada jugadari aliansi dokter seduni. Karena sekarang kan era informasi yang serba terbuka ya, jadi informasinya bisa diakses oleh siapa saja, jadi ini yang susah dijelaskan kepada masyarakat. Makanya kami dari MUI selalu meminta kepada Satgas Covid untuk menjelaskan duduk masalah yang sebenarnya. Sehingga kami juga gampang menyampaikan ke mereka.

Jadi darimana MUI mendapat informasi mengenai isu yang sedang berkembang di masyarakat tersebut?

Berdasarkan pertanyaan mereka ketika kita turun, kemudian kedua di medsos, kan kita juga punya grup, banyak yang share dan mereka yakin itu. Jadi bukan Cuma di grup MUI. Tapi juga Grup Ormas termasuk di NU, karena kebetulan saya juga ketua NU. Saya sendiri juga banyak tergabung di grup. Ada grup para muballigh, lembaga dakwah Nahdhatul Ulama. Kemudian saya juga punya grup itu, asosiasi guru PAI, jadi semua guru pendidikan agama islam sekabupaten Bulukumba ada disitu. Jadi terakses semua disitu.

Jadi dalam penyampaian informasi tadi, kami memanfaatkan grup whatsapp dan sosial media. Selain itu juga memaksimalkan peran Guru Agama, Imam, penyuluh, muballigh, dan penghulu. Kami menilai sangat efektif karena cepat, langsung turun ke masyarakat. Selain itu juga paling efektif jika dengan pendekatan kultur, misalnya kita silaturahmi ke kelompok penyuluh di satu kecamatan, kelompok guru agama, dan face to face kita berbicara itu agak efektif. Karena mereka yakin karena mengenal kita. Dan memang dengan cara seperti itu, saya merasakan ada perubahan yang luar biasa. Jadi ketika terjadi itu, kami pernah seluruh ormas itu, diprakarsai oleh MUI, saya sendiri diberia tugas oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia untuk memberi penjelasan kaitannya dengan ushul fiqih dari pelarangan itu. Nanti Ormasnya bertugas kebawah menyampaikan.

Perlu juga saya sampaikan, karena saya sendiri juga merupakan Ketua NU, bahwa NU ini punya organisasi sayap yang cukup banyak. Di Bulukumba itu yang aktif ada Muslimat, ketuanya itu Ibu Kustigawati, ada GP Anshor, kemudian Lembaga Dakwah NU ketuanya Andi Armayadi, kemudian Lakpesdam, banyak di desa-desa itu pembaca barsanji itu orang NU itu. NU kultural namanya. Yang biasa zikir-zikir di rujab Bupati itu juga, termasuk yang membackup tahlilan.

Nah di hp saya ini saya tergabung di grup whatsapp seluruh ketua cabang NU sedunia. Kana da lebih dari 100 negara itu ada cabang NU. Jadi saya juga banyak mendapat informasi dari situ. Jadi selama pandemic ini kita

memang lebih banyak berkoordinasi lewat WA grup. Tapi sesekali dengan pengurus terbatas kita ketemu. Ketua-ketuanya. NU juga ada cabangnya di kecamatan, namanya Majelis Wakil Cabang. Yang baru-baru saya bentuk ini adalah MWCI Masyarakat Adat Kajang Ammatoa. Itu MWCI ke 17 se Indonesia. Majelis Wakil Cabang Istimewa. Karena mereka kan punya teritorial tersendiri disana. Kalau Istimewa Cabang, bukan Wakil Cabang, itu seluruh Negara ada. Itu namanya pengurus cabang istimewa. Jadi potensinya sangat besar karena profesinya macam-macam. Ada guru, dai-dai.

| | |
|-------------------|--|
| Nama | : Sunarti Sain |
| Pekerjaan/Jabatan | : Pemred Harian Radar Selatan |
| Hari/Tgl. | : Rabu, 19 Januari 2022 |
| Tempat | : Kantor Harian Radar Selatan, Bulukumba |

Apakah Radar Selatan sudah ada kerjasama dengan Pemerintah?

Kerjasama dengan pemerintah di tahun 2021 sama sekali tidak ada. Maksudnya kerjasama dalam bentuk pemberitaan, maupun upaya sosialisasi itu tidak ada. Yang kami lakukan adalah berinisiatif sendiri menerbitkan iklan layanan masyarakat. Pertama supaya masyarakat lebih meningkatkan kewaspadaan, menerapkan protokol kesehatan. Kemudian yang terakhir ini kita bikin iklan layanan masyarakat mengajak warga untuk mau divaksin. Bahwa vaksin itu aman dan halal. Karena kami juga prihatin dengan capaian vaksinasi yang ada di daerah ini. Jadi itu inisiatif, tidak ada kerjasama dengan pemerintah dan kami sudah munculkan di Koran dan online. Kami sebenarnya sudah menawarkan, mengajak Dinas Kesehatan kerjasama kemudian Kominfo, untuk upaya-upaya penyebarluasan informasi tentang kesehatan karena kita dalam situasi pandemic, dan juga infodemi dengan banyaknya hoaks itu tapi pemerintah daerah selalu beralasan tidak memiliki anggaran. Jadi kita tidak mau terpaksa dengan tidak melakukan apa-apa. Tapi kami melakukan inisiatif sendiri dengan membuat iklan layanan masyarakat.

Bentuk kerjasama seperti apa yang ditawarkan ke Pemerintah?

Yang kami tawarkan adalah pertama pada saat awal-awal Covid 19 itu di 2020, kita kan Covid 2020 Maret itu masuk ya. Jadi pada saat itu kita masih shock, kita tidak punya satu konsep yang bisa dibilang manjur, kita masih sangat sporadic melakukan berbagai upaya, jadi tidak terarah di awal-awal itu. Hoaks sangat kencang, informasi yang diterima masyarakat juga informasi yang liar yang beredar di grup whatsapp dan sebagainya, di media sosial, itu rata-rata memang tidak bertanggungjawab, jadi melihat fenomena itu ada upaya dari kami untuk mengajak pemerintah daerah dalam hal ini

Dinas Kesehatan untuk melakukan kerjasama. Karena Dinas Kesehatan yang punya kewenangan untuk menjelaskan secara keilmuannya ya, medis begitu tentang apa sih Covid 19 itu, ini virus apa sih, proses penyebarannya. Itu yang kita butuhkan sebenarnya. Informasi yang benar-benar dari pihak-pihak dan OPD-OPD terkait yang lebih clear begitu ya, yang bisa diterima masyarakat. Dan kita juga mendapatkan informasi yang A1 maksudnya. Tapi dari Dinkes sendiri ternyata selalu beranggapan bahwa sosialisasi itu yang mereka pahami adalah sosialisasi dalam bentuk misalnya mereka menyampaikan ke pembuat brosur, bikin cetak spanduk, pasang dimana-mana. Belum menyentuh bahwa menggunakan media itu juga punya power begitu. Kalau mereka bekerjasama dengan media, menggunakan fasilitas yang ada di media mainstream ya, kita juga punya power, punya jangkauan yang cukup luas untuk sampai di masyarakat. Bahkan hingga ke desa.

Bentuk penyebarluasan yang itu kerjasamakan bentuknya seperti apa?

Berita dan iklan. Iklan itu kan bisa dibikinkan infografisnya, kalau berita lebih banyak pada edukasi. Sebenarnya CoVid 19 itu apa sih, cara penyebarannya seperti apa, bagaimana kita menghadapi Covid 19. Jadi bisa di cetak maupun online. Juga bisa dalam bentuk program. Tapi kita tidak hanya apa ya, walaupun pemerintah daerah belum merespon itu, ternyata beberapa program misalnya dari program kementerian Kominfo kan juga sampai ke Bulukumba, kami ada 7 orang jurnalis kami yang mendapatkan program beasiswa ubah laku. Itu kaitannya dengan Covid 19. Jadi mereka berkewajiban untuk membuat tulisan yang ada hubungannya dengan Covid 19. Intinya melakukan edukasi ke masyarakat, bagaimana berperilaku yang sehat di masa pandemic ini. Jadi kalau ada yang dimuat di radar Selatan, kampanye ubah laku, itu kami dapat dari Kementerian Kominfo bukan dari Pemerintah Daerah.

Ini namanya beasiswa ubah laku. Wartawan ini berkewajiban setiap bulan menulis. Ada minimal target tulisan tentang ubah laku Covid 19 dan program vaksinasi sekarang yang itu kemudian harus mereka report ke kementerian. Itu yang kemudian yang dibayarkan dalam bentuk beasiswa senilai dua juta lima ratus kalau saya tidak salah. Jadi ini bentuknya penyebarluasan informasi di media dimana mereka berada. Jadi ada yang menulis di cetak, ada yang menulis di online Radar Selatan. Jadi wartawan ini diseleksi. Dan ini program selama setahun.

Apakah Radar Selatan menemukan dilapangan terkait misinformasi dan disinformasi yang beredar di masyarakat?

Saya kira banyak ya bentuknya. Kalau misinformasi itu misalnya banyak sekali mitos-mitos yang beredar di masyarakat kemudian itu menjadi

keyakinan masyarakat. Bahwa kalau saya minum air kelapa pada saat di vaksin, maka vaksin itu menjadi tidak berpengaruh di tubuh kita. Kan pernah sempat beredar begitu.

Itu kan semua misinformasi yang kemudian menjadi keyakinan dalam masyarakat karena mereka tidak mendapatkan penjelasan secara ilmiahnya seperti apa. Padahal kan kalau diberikan penjelasan bahwa suntikan vaksin itu dia masuknya ke darah. Sementara kalau kita minumnya air kelapa muda masuknya ke lambung kan, usus, dan sebenarnya tidak nyambung. Sebenarnya masyarakat kalau diberi pengetahuan seperti itu. Pasti mereka akhirnya akan sadar karena tidak ada yang memberikan kesadaran itu. Nah terkait juga dengan misinformasi dan disinformasi yang beredar di masyarakat. Termasuk kalau chip kan sempat ada juga orang yang percaya sama chip. Bahwa kita di remote saja mati semua ma kin anti karena ada chip tertanam. Itu semua kan sebenarnya hal-hal yang tidak masuk di akal ta. Tapi karena kita sudah terlanjur dijejali dengan informasi itu, jadi itu menjadi keyakinan. Apalagi orang-orang yang di kampung-kampung yang mungkin tidak atau jarang mendapatkan informasi yang bertanggungjawab soal Covid 19. Yang selama ini banyak beredar kan informasi itu tadi. Ada juga yang memang sengaja. Sudah tau informasinya salah tapi tetap saja dia sebar. Dia ikut menyebarkan. Karena mungkin berkaitan dengan pilihan politik lagi atau ada kaitannya dengan agama. Kita kan paling sensitive kalau dikaitkan dengan isu agama. Bahwa ini akan jadi pembantaian massal umat muslim begitu. Bahwa ini sebenarnya kerjanya Yahudi. Walaupun sebenarnya kita ada keraguan, tapi karena disentuh lagi religisitasnya kita kemudian kita meyakini itu. Apalagi kemarin sempat beredar bahwa ada unsur babi didalam vaksin itu.

Jadi saya melihat isu-isu ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Karena kenapa, kemudian banyak yang tidak percaya bahwa Covid 19 itu ada, masih ada. Mungkin jumlah kalau diawal-awal itu banyak kemudian setelah ada pengetahuan diberikan, disentuh, kemudian jumlahnya berkurang. Tapi kelompok ini tetap ada. Yang tetap percaya kalau Covid 19 itu buatan. Bukan sebuah pandemic. Banyak yang percaya ini ada peran-peran, unsur politik didalamnya. Termasuk soal vaksinasi. Banyak juga yang beranggapan soal bisnis ya, tapi ini kan persoalan kesehatan. Kita tidak menyentuh soal apa sih bisnis yang ada dibalik vaksinasi dan alat-alat kesehatan yang dijual itu.

Jadi meskipun tidak ada kerjasama bernilai bisnis dengan pemerintah, Radar Selatan tetap berupaya melakukan penyebaran informasi ya?

Sangat malah. Saya menganggap kita ini terlalu gelisah melihat situasi ini, sampai kita melakukan banyak sekali program selama 2021 kemarin

walaupun tanpa ada anggaran kerjasama dari pemerintah. Kita malah dapat kerjasamanya dengan pihak lain. Misalnya dengan Google News Initiative. Kita training jurnalis untuk mereka menjadi paham bagaimana sih, apa yang harus dilakukan oleh jurnalis dan medianya tentu, dengan menjawab tantangan banyaknya hoaks ini, terutama tentang Covid dan Vaksin. Training untuk jurnalis tentang misinformasi dan disinformasi soal vaksin. Itu bahkan dua kali kita lakukan selama 2021, tidak hanya menjangkau jurnalis di Radar Selatan, tapi juga kita ajak jurnalis yang lain yang ada di wilayah selatan ini, di Bulukumba, Bantaeng, Gowa, Selayar, karena reporter Radar kana da di beberapa Kabupaten itu. Kita ajak mereka termasuk wartawan lain diluar Radar. Kemarin kita ajak Metro TV, ada beberapa lah. Punya frekuensi yang sama dengan kita dalam melihat persoalan ini.

Yang kedua yang terakhir saya ingat sekali, yang kita lakukan itu iklan kampanye untuk mengajak masyarakat tidak takut terhadap Vaksin, itu juga kita prihatin dengan capaian Vaksinasi, saya malah koordinasikan ini ke Pak Kapolres. Saya bilang Pak Kapolres apa yang bisa saya lakukan untuk bantu kerja-kerja satgas pemerintah. Saya sekarang sudah tidak bisa berharap banyak dengan pemerintah untuk diajak bekerjasama, misalnya anggaran satgas itu dialihkan pada kampanye media. Buktinya mereka menganggap itu sesuatu yang penting. Oke, karena saya menganggap ini penting dan saya menganggap ini adalah maslaha besar yang kita hadapi bersama, ya saya merasa bertanggungjawab juga dong sbagai media. Saya muat di halaman satu itu iklan kampanyenya. Makanya saya tulis disitu, iklan ini dipersembahkan oleh Radar Selatan.

Jadi darimana sumber informasi terkait Covid 19 diperoleh?

Reporter kita yang aktif melakukan wawancara, mencari data, bukan hanya Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, tapi kita juga punya narasumber banyak dari Makassar. Ada Dinkes Sulsel, kemudian yang terakhir KIPI ini kita banyak komunikasi aktif Komite Paska vaksin, ketika ada kejadian-kejadian paska vaksin itu, Bulukumba kan termasuk ada beberapa kasus meninggal, ada beberapa media yang mengabarkan kalau usai vaksin meninggal, padahal kan hasil investigasi KIPI yang sudah dikeluarkan, itu bukan karena vaksinasinya, tapi yang bersangkutan punya penyakit bawaan lain. Dan itu kejadiannya bukan setelah vaksin, tapi mungkin tiga atau empat minggu setelah vaksin. Itu sebenarnya yang menjadi kekhawatiran kita ketika kejadian ini tidak direspon cepat oleh Dinas Kesehatan itu akan menjadi liar informasinya yang berkembang di masyarakat. Buktinya kemarin seperti itu. Bisa jadi itu juga yang membuat orang menjadi takut untuk divaksin.

Bagaimana ibu menanggapi upaya penyebarluasan informasi melalui gupr media di Whatsapp?

Itu rilis. Yang menurut saya rilis yang disebar tidak clear tidak tuntas. Tidak detail. Karena rilis yang disebar tentang jumlah pasien Covid. Peristiwanya, jadi bukan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Jadi misalkan Bulukumba pasien yang positif Covid sekian, yang sembuh sekian. Masyarakat ini yang dibutuhkan bukan cuma data-data tentang berapa yang kena Covid, yang sembuh berapa, yang meninggal berapa. Tapi mereka juga butuh informasi yang bisa menjawab hoaks itu tadi. Bshwa inilah masyarakat jangan percaya hoaks. Bahwa yang betul itu seperti ini. Ada solusi yang diberikan. Kalau mau mendapatkan informasi yang benar. Lihat dulu, misalnya disampaikan. Yang beredar di masyarakat itu kan banyak tentang hoaks. Nah bagaimana kita mengenali hoaks tentang Covid dan Vaksin. Itu juga yang dibutuhkan masyarakat. Supaya mereka teredukasi, punya literasi digital yang bagus. Jadi kita tidak hanya menjadi pengguna digital yang sangat massive, tapi kita menjadi pengguna digital yang cerdas. Bisa membedakan mana informasi yang hoaks, mana informasi yang bertanggungjawab, Jadi edukasinya sebenarnya yang kurang mengajak masyarakat untuk tidak gampang percaya hoaks. Itu kan termasuk salah satu edukasi sebenarnya, kalau ada berita hoaks yang beredar, harusnya responya cepat. Kalau misalnya yang ini hoaks, lantas yang tidak hoaks yang bagaimana. Jadi bukan sekedar informasi tentang jumlah kasus positif Covid, meninggal sekian orang, yang di rumah sakit sekian orang. Seperti Bulukumba level PPKM 1, tapi pencapaian-pencapaian itu juga harus jelas.

Dengan Dinas apa biasanya teman-teman Radar berkoordinasi untuk mendapatkan informasi mengenai Covid 19?

Lebih banyak sih ke Dinas Kesehatan. Malah yang terjadi selama ini di radar Selatan kami yang aktif melakukan wawancara. Jadi kita tidak menunggu rilis. Tidak menunggu informasi itu datang dari satgas. Tapi reporter yang aktif untuk mendatangi Satgas, wawancara jubi satgas, wawancara kela dinas kesehatan, wawancara bupati, kapolres, yang berkaitan langsung dengan situasi sekarang ini. Covid dan Vaksin. Jadi selama ini kita ke Dinas Kesehatan karena membutuhkan informasi yang langsung. Karena selama ini kita bertanya ke Jubir tentang persoalan tertentu malah diminta ke Dinas Kesehatan langsung. Jadi terlalu panjang prosesnya ya.

Apa saja produk-produk Media Radar Selatan?

Produk media kita ada cetak, ada Koran radar selatan, ada online, kita punya youtube channel, media sosial yang kita sudah kelola saat ini ada instagram, facebook, twitter, dan sekarang yang terbaru sekarang ada Tiktok.

Pada saat radar selatan memuat seperti iklan layanan masyarakat, biasanya distribusi penyebarluasannya kemana saja?

Distribusinya kita pakai selain langganan kami, kita juga beradaptasi dengan media sosial yang sekarang perkembangannya memang sangat cepat. Distribusi kita lakukan ke media sosial juga. Jadi konten-konten pilihan yang ada di cetak dan online, kita distribusikan juga ke media sosial kita. Bahkan kita berkolaborasi dengan beberapa akun medsos di Makassar, akun-akun info kejadian. Jadi mereka sering meminta info apa yang bisa mereka ikut share tentunya yang ada kaitannya dengan publik yak e akunnya mereka.

Kalo terkait persoalan vaksin, seperti apa temuan teman-teman jurnalis radar di lapangan?

Ya kami kan sekarang sedang melakukan program juga yang kami sebut juga dengan jurnalis warga. Salah satu poin penting yang kami lakukan di jurnalis warga ini kita berusaha juga untuk mengangkat isu vaksinasi ini dan Covid 19. Karena setelah kita diskusikan dengan beberapa teman jurnalis warga banyak problem yang terjadi dalam masyarakat. Pertama, masih banyak ketidakjelasan informasi soal vaksinasi. Itu tadi, ketidakjelasan informasi ini yang melahirkan hoaks, misinformasi dan disinformasi. Kemudian masyarakat juga masih ada yang tidak percaya kalau Covid itu ada. Ini harus diakui, dan selain itu akses dengan sarana-sarana kesehatan itu juga masih terbatas. Itu yang kemarin mereka sampaikan. Terutama di kelompok-kelompok disabilitas. Kelompok disabilitas di Bulukumba itu bahkan 80% belum ada yang divaksin karena mereka takut. Yang kedua, informasi tersebut juga belum menyentuh mereka. Saya pernah tanya apakah pemerintah pernah datang untuk menyampaikan tentang Covid tentang Vaksin, dan mereka bilang tidak pernah ada. Jadi mereka mendapatkan informasinya dari luar. Dari grup whatsapp dari media sosial. Itu semua kan yang kerap menjadi tumbuh suburnya hoaks disitu. Karena ketidaktahuan saja sebenarnya. Jadi kita akan menjalankan program di 2022 ini dengan memaksimalkan jurnalis warga. Jurnalis warga itu yang kemudian menjembatani kita untuk mengetahui problem yang sebenarnya terjadi di masyarakat, kemudian bagaimana mereka menjawab tantangan itu untuk kelompoknya sendiri. Untuk dirinya sendiri.

Siapa saja jurnalis warga dan bagaimana model penjangkungannya?

Jurnalis warga ini sebenarnya sudah kita bikin sejak sebelum Covid. Itu awalnya kita menjangkau pemuda-pemuda di desa. Jadi perangkat Desa yang anak-anak muda yang tertarik untuk belajar jurnalistik kita ajak untuk bergabung dengan jurnalis warga Radar Selatan. Dan merka kita latih, kemudian kita bikinkan forumnya, secara berkala tulisan-tulisan mereka setelah melalui proses editing di redaksi lalu kita muat di cetak dan di online. Kita bikinkan juga rubric sendiri tentang jurnalis warga. Tahun 2020 kita mulai sentuh kelompok disabilitas. Jadi berkembang dari desa, berkembang lagi

kita sentuh lagi kelompok lain. Kelompok-kelompok rentan. Termasuk disabilitas ini. Jadi kita sekarang punya komunitas jurnalis warga yang selain isinya masyarakat-masyarakat di desa, kita memang baru sekitar 25 desa yang aktif ya, di 10 kecamatan. Di masing-masing kecamatan itu ada perwakilannya. Dan kelompok disabilitas. Itu yang sekarang aktif. Jadi paling tidak sebulan sekali mereka mengirim reportase. Laporan yang mereka kirim juga kita edit dulu. Jadi kalau tidak lengkap ya kita nda muat juga. Kita minta lagi tolong perbaiki lagi ini, yang kurang juga. Biasanya gagasan kita minta dari mereka. Apa yang menari di desa mu. Apa yang menarik di lingkunganmu, ketika ini diangkat di media menjadi sesuatu yang penting untuk orang baca. Kemudian ada juga isu-isu humanis. Kalau humanis ini lebih ke teman-teman disabilitas. Bagaimana mereka menjadi lebih berdaya dan tidak dipandang dikasihani. Tapi mereka menjadi pribadi-pribadi yang berdaya, bisa berkontribusi kepada pembangunan daerah, melawan stigma dan lain-lain.

Akhirnya sampai pada isu Covid dan Vaksin. Ketika ditanya apa teman-teman sudah divaksin. Ternyata belum. Jadi informasinya belum menyentuh mereka. Nanti kita jalan-jalan kesana. Difabel rungu. Bisa ditanyakan ke kominfo. Apakah pernah membuat satu konten informasi yang menggunakan juru bicara isyarat. Itu belum ada. Sementara mereka itu jumlahnya banyak. Disabilitas Bulukumba itu jumlahnya mungkin seribuan.

Baik Ibu. Saya kira sudah cukup. Terimakasih atas waktunya.

| | |
|-------------------|---|
| Nama | : Andi Ayatullah Ahmad, S.Sos, M.IKom |
| Pekerjaan/Jabatan | : Kasubag Publikasi Bagian Humas |
| Hari/Tgl. | : Jum'at, 21 Januari 2022 |
| Tempat | : Kantor Bupati, Bagian Humas Setda Bulukumba |

Apa sih peran dan kedudukan Humas dalam penanganan Covid 19 di Kabupaten Bulukumba?

Dia di bidang data dan informasi di komando oleh jubir. Jubir itu Diskominfo Pak Daud Kahal. Jadi seluruh penyampaian terkait covid itu disampaikan oleh jubir. Tapi bahannya ada dari dikelola oleh bidang data dan humas.

Terkait peran tersebut apakah bagian humas melakukan riset terlebih dahulu untuk mengetahui apa saja persoalan yang dihadapi sehingga dalam hal memformulasikan pesan itu didasari atas hasil riset tersebut?

Sebenarnya tidak ada riset sih, tapi melihat saja fenomena masyarakat yang terjadi setelah Covid masuk di Indonesia termasuk Bulukumba. Jadi ada berbagai kasus kemudian ditanggapi oleh masyarakat, tanggapan masyarakat juga beda-beda. Termasuk masih isu-isu pelarangan-pelarangan berkumpul, termasuk peraturan bupati terkait pembatasan aktivitas masyarakat misalnya di masjid, sekolah, terutama yang paling dapat resistensi itu adalah pelaksanaan ibadah di masjid.

Dalam hal menyusun pesan-pesan yang ingin disampaikan itu siapa saja yang menjadi bagian dari bidang data dan informasi?

Kami diskusi dengan teman-teman dari pihak kepolisian, teman-teman dari pihak TNI, termasuk teman-teman jurnalis terkait fenomena yang ditangkap tentang berbagai masalah yang ada dampak dari wabah pandemic covid itu, kemudian kita luruskan bersama, koordinasinya dengan juru bicara yang menyampaikan hal-hal yang sifatnya meluruskan informasi-informasi yang heboh pada saat itu ya. Misalnya kasus pertama dulu yang warga di Gantarang padahal ternyata orang itu berasal dari Malaysia.

Jadi kasus yang pertama itu adalah, yang bonto masila itu yang anaknya positif kasus pertama, kemudian dibawa ke rumah sakit di Makassar didapat kalau Covid kemudian ternyata meninggal, kemudian setelah anaknya meninggal, ibu sebagai kontak erat ternyata juga positif. Itulah menyebabkan pada saat itu masyarakat sangat ego di sekitar wilayah bonto masila. Sehingga saat itu kami bersama dinas kesehatan langsung turun ke masyarakat. Langsung melakukan edukasi memberikan edukasi melalui pengeras suara di sekitar pada saat menguburan anak ini karena ada penolakan dari masyarakat terhadap anak tersebut untuk dikuburkan di Bonto Masila.

Bisakah dijelaskan apa yang menyebabkan masyarakat begitu khawatir dan menjadi isu yang menghebohkan?

Covid kan pada saat itu kita banyak persepsi dari masyarakat. Sesuatu yang sangat menakutkan kemudian, biar lewat depan rumahnya itu bisa menghembus, bisa tertular, dengan hal-hal seperti itulah yang menyebabkan masyarakat ketakutan. Karena adanya vonis bahwa covid itu membahayakan pada saat itu. Artinya kekhawatiran itu bisa kita dapat pertama di kasus Bonto Masila, kasus kedua di Baturapa yang anak pondok pesantren dari Jawa Tengah itu, Magelang kalau nda salah, yang anak santrinya pulang-pulang positif dan terisolasi, sampai-sampai penjual tidak ada yang masuk kesitu.

Dia terisolasi atau memang pemerintah sengaja menutup area itu?

Tidak. Karena memang masyarakat phobia terhadap ketika diketahui bahwa dia adalah disana ada Covid maka dihindari. Bahkan masyarakatnya ketika ditau bahwa dia dari Baturapa dia ditolak untuk melakukan transaksi. Misalnya di pasar ya. Ditau kalau dia dari Baturapa. Maka dia tidak dilayani. Karena informasinya itu menyatakan bahwa Covid itu sangat membahayakan, meski sebenarnya kita bisa menghindari dengan protocol kesehatan misalnya pake masker, cuci tangan. Tapi sudah menjadi stigma bahwa Covid ini begini-begini. Makanya penjual keliling tidak ada yang masuk. Olehnya itu pada saat itu kita pemerintah menngedrop bantuan sosial kesana, sembako, beberapa juga pengusaha-pengusaha, Baznas Bulukumba, karena tidak ada penjual. Mereka juga tidak bisa keluar untuk membeli.

Jadi bisa dikatakan bahwa fenomena yang terjadi di masa-masa awal pandemi adalah lebih kepada masyarakat belum tahu ya bukan karena terpapar informasi yang salah?

Belum ada informasi yang jelas terkait sebenarnya Covid itu. Dia hanya mendapatkan informasi bahwa ketika Covid harus diisolasi, harus apa, sehingga tidak boleh berhubungan dengan orang itu karena mudah tertular. Bahkan ketika dibuatkan posko-posko Desa. Kasus yang ketiga itu di Bira. Jadi meski diatas mobil, orang dilarang masuk. Karena dia piker biar meludah bisa tertular.

Tapi itu belum transmisi lokal ya?

Dia hanya ketakutan kalau ada orang masuk datang karena daerah Pariwisata

Dari situ kan pemerintah mestinya tahu hal-hal yang seharusnya diketahui masyarakat secara bertahap, meskipun tidak melakukan riset ya, dari hasil pengamatan, ada tidak upaya untuk melakukan sebuah strategi atau perencanaan, bagaimana atau apa informasi yang akan disampaikan ke masyarakat?

Jadi itu hanya berjalan alami. Artinya bahwa misalnya di kasus pertama masyarakat ketakutan dengan adanya kasus yang meninggal Covid. Sehingga dia piker itu akan menular. Padahal sebenarnya sudah disampaikan bahwa ketika sudah dilakukan pemulasaran jenazah, virus itu tidak akan pindah. Karena tidak ada droplet. Karena orang sudah meninggal jadi tidak lagi menularkan. Jadi ketakutan saat itu masyarakat sebenarnya

kepada orang meninggal yang positif. Makanya ada beberapa yang melakukan penolakan. Kemudian yang kedua ada yang menganggap itu aib. Sehingga pelan-pelan kita pemerintah karena Dinas Kesehatan yang memahami konteks virus ini seperti apa makanya lebih banyak kami di Data Informasi ini lebih banyak mendiskusikan dengan teman-teman di Dinas Kesehatan seperti apa posisi-posisi dan tingkat bahaya virus itu. Sehingga tentu kalau orang yang berkompeten menyampaikan, misalnya seorang dokter, orang dari dinas kesehatan, itu lebih kredibel sehingga bisa didengar.

Bisakah disampaikan pada tahap-tahap awal, informasinya berisi tentang apa saja tahapannya?

Pertama bahwa kita, pemerintah kabupaten itu harus sejalan dengan misi dari pemerintah pusat. Penyampaian oleh jubi pemerintah pusat itu yang harus juga kita sosialisasikan ke masyarakat. Maksudnya begini, bahwa misalnya ada peningkatan jumlah kasus Covid itu karena masyarakat tidak disiplin menerapkan protocol kesehatan. Makanya kita lebih pada upaya penyadaran ke masyarakat untuk tidak berkumpul, karena memang itu penekanannya dari pemerintah pusat, lebih kepada pencegahan supaya tidak ada penambahan kasus Covid Di Bulukumba. Misalnya orang tidak menerapkan protocol kesehatan. Awalnya kan pernah rumah-rumah ibadah, masjid itu ditutup. Seiring dengan perkembangan tidak ditutp tapi menyiapkan standar protocol kesehatan, misalnya cuci tangan dan jaga jarak. Dan ini banyak yang kita temukan masyarakat tidak taat itu, makanya satgas ketika ada laporan masuk bahwa ada masyarakat yang tidak taat maka kita melakukan pendekatan-pendekatan. Kita turun bersama, TNI, aparat Kepolisian, menyampaikan supaya dia menerapkan protocol kesehatan, supaya kasus Covid ini tidak bertambah. Meski pada akhirnya jumlahnya semakin melandai, dan kasus yang terakhir kan ketika pelaksanaan lebaran itu ditiadakan. Tidak boleh pulang kampung juga ya. Itu juga banyak hal yang terjadi. Misalnya teman-teman di Satgas lebih banyak menangani hal-hal yang sifatnya penolakan dari masyarakat. Dan itu yang menjadi sasaran untuk kita selesaikan pada kasus tertentu.

Jadi pemerintah mendengar bahwa ada suatu wilayah yang melakukan penolakan terhadap upaya pencegahan terkait kebijakan protocol kesehatan, pemerintah merespon itu dengan langsung mendatangi masyarakat ya bersama unsur lain yang dilibatkan?

Ya langsung mendatangi. Penyampaian secara langsung kita ramu dalam bentuk misalnya kegiatan bahwa ada upaya sosialisasi dsb. Tapi terkait

dengan model komunikasinya itu langsung. Dialog dengan masyarakat, dengan sasaran dengan mendatangi langsung. Memberikan pemahaman. Biasanya juga di warkop yang tidak sesuai standar. Pernah kan kita terapkan jam malam

Apakah ada anggaran khusus terkait penanganan Covid 19 khususnya di bidang data dan informasi?

Sempat ada anggaran tapi itu yang dikelola oleh pihak ketiga, pada saat kita mau berikan percontohan. Pada saat itu anggaran khusus untuk sosialisasi bagaimana sebuah wilayah mendukung program pencegahan penularan Covid. Saat itu kita anggarkan adalah bagaimana membuat video base practice bagaimana yang terjadi di Desa Karama yakni adanya penyediaan tempat cuci tangan di masing-masing rumah warga. Jadi itu adalah salah satu contoh bagaimana desa membangun upaya pencegahan Covid 19. Yang kita anggarkan semacam video kampanye kepada masyarakat.

Videonya ditayangkan dimana?

Meski dikirim ke pusat, tapi kita juga sosialisasikan di media-media sosial. Ada di kirim ke Whatsapp, facebook dengan harapan masyarakat dan wilayah lainnya bisa mencontoh. Juga sempat tayang juga di televise nasional seperti Metro TV dan TV One.

Kalau di media-media sosial siapa yang menyebarkan?

Ya perangkat pemerintah. Termasuk teman-teman yang focus memang, kan begini di media sosial kan kita “berperang” dengan orang-orang yang yang menolak menerapkan protokol kesehatan, yang menolak atau yang tidak mempercayai adanya Covid.

Bisa dibilang bahwa media sosial itu yang dikelola sama pemerintah ya?

Termasuk media radio juga oleh teman-teman Kominfo secara berkala, media sosial, termasuk kita sebagai PNS baik yang ada di Satgas maupun teman-teman PNS yang harus memang tanggungjawab memberikan edukasi ke masyarakat.

Berapa itu anggaran pembuatan Video pak?

15 juta kalau tidak salah. Dan dikerjakan oleh orang professional.

Anggaran itu bersumber darimana?

Dari Dana satgas kemudian dialokasikan ke Kominfo.

Memang tertuang dalam APBD?

Kan ada dana sosialisasi di Dinas Kesehatan, kemudian dipercayakan ke Kominfo untuk membantu proses pembuatannya. Saya juga tambahkan, saya di Humas, mempublikasi baliho-baliho penerapan protokol kesehatan di 10 kecamatan. Jadi ada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Jadi ada lewat Baliho. Media Luar Ruang. Sosialisasi itu sangat massive di Baliho. Baik oleh pemerintah Kabupaten, Kecamatan, maupun masing-masing Kepala Desa. Dan kami malah mungkin karena keterbatasan mereka kita menambah. Kalau saya di Bagian HUmas memang saya anggarkan. Kan ada kami anggarkan percetakan Baliho, karena tidak ada kegiatan, pada saat itu Covid maka saya lirikan kesitu. Untuk Sosialisasi ada memang anggarannya kalau saya.

Ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan, ada tidak evaluasi dalam upaya penyebarluasan informasi?

Berjalan alami saja. Karena sebenarnya kan ini kalau kita ingin ikuti perkembangan Covid sebenarnya Trial and Error. Baik kita sebagai pemerintah, hanya coba-coba melakukan karena tidak ada pengalaman sebelumnya. Kenapa tiba-tiba lockdown. Kita hanya berupaya mencoba bagaimana-bagaimana. Sehingga kan akhirnya regulasinya berubah-ubah. Kadang PPKM, kemudian level 2 level 3 dan sebagainya, menurut saya ini juga yang menyebabkan karena uji coba, akhirnya masyarakat juga pada akhirnya bosan terhadap berbagai regulasi-regulasi yang disampaikan. BUKAN kesalahan pemerintah daerah, tapi kan kita mengikut ke pemerintah pusat. Ini namanya wabah pandemic, artinya satu kebijakan untuk seluruh wilayah Indonesia.

Tapi regulasi itu memang berubah-ubah jika ada hal perlu diperbaiki karena disamakan antara Jawa dengan wilayah lainnya. Bahkan di tingkat Jubir Nasional sudah tidak ada breaking news setiap saat bagi jubir untuk bicara. Karena itu dianggap tidak efektif. Lebih baik langsung di share datanya. Tidak perlu dijelaskan. Pada akhirnya sudah tidak ada Jubir lagi.

Jadi bisa saya simpulkan bahwa di tingkat Kabupaten bentuknya adalah, selain mencoba merespon kebijakan pusat terkait Covid, juga melihat dari apa yang kita lihat sendiri di masyarakat ya, bahwa penerapannya di tiap-tiap provinsi menjadi kurang efektif karena tidak bisa disamaratakan?

Iya.

Masuk ke isu misinformasi dan disinformasi. Apakah ada upaya mengumpulkandata mengenai itu baik dari skala lokal, nasional, ataupun isu dunia yang menjadi perhatian khusus?

Ada beberapa. Pertama kasus yang muncul itu adalah ketika seseorang divonis Covid, yang kemudian keluarganya menolak. Sehingga ada perdebatan dalam proses misalnya yang paling bermasalah dulu itu adalah, karena kalau dia status Covid maka protapnya adalah tidak ada persemayaman, langsung dikuburkan, tidak boleh dilihat. Itulah kemudian tidak sesuai dengan tradisi masyarakat karena dilarang melayat. Itulah banyak yang secara kemanusiaan sangat bertentangan. Tapi karena pertimbangan kesehatan makanya dilarang. Beberapa kasus yang terjadi di Satgas, terkadang informasinya kan sudah didapat bahwa dia Covid, maka keluar prosedur pemulasaran. Pihak keluarga kemudian meminta buktinya yang registrasinya dikeluarkan oleh RS Wahidin misalnya yang menentukan hasil swab nya. Itu kan hanya di Makassar. Terkadang kita sudah dapat tapi keluarga belum. Sehingga ada penolakan. Disinformasinya bahwa kadang pihak keluarga ini yang mengshare memprovokasi yang lain membangun opini bahwa keluarga yang meninggal bukan Covid.

Sampai juga terus membangun opini pemerintah salah, ketika misalnya ada yang meninggal kan seharusnya ada tracing ke kontak erat. Ternyata karena pada saat itu kan kondisinya sangat padat petugas kesehatan juga terbatas itu juga jadi bulan-bulanan. Sehingga semakin tidak percaya. Dia ambil kesimpulan bahwa kenapa kalau memang keluarga kami Covid kenapa kami tidak di tracing dan swab. Memang ada faktanya seperti itu karena banyak orang setiap saat, setiap hari melakukan tracing terhadap kontak erat.

Yang kedua, saya sebagai orang humas di tim data itu sempat diserang juga terkait ada kemarin ada kemarin kasus kejadian di Gowa. Ada jamaah tabligh yang pertemuan jamaah tabligh se Indonesia itu di Gowa, kemudian ada yang Covid ternyata setelah kita telusuri meski acara dibatalkan ada yang ke Bulukumba dan di Bulukumba dia didapat dan Covid. Sehingga hasil penelusuran ternyata dari Gowa. Sehingga pada saat itu sempat saling menyalahkan dan menolak bahwa tidak dari Gowa. Sampai kita membuat keterangan tertulis.

Jadi rilis kami adalah, Pasien positif Covid 19 Bulukumba bertambah satu dari cluster Ijtima Gowa, setelah hasil swab nya dinyatakan positif di balai besar laboratorium kesehatan Makassar. Pasien positif 002 inisial TU ini merupakan anggota jamaah tabligh yang berasal dari cluster ijtima Gowa. Ini kemudian

dibantah oleh berbagai pihak. Menolak bahwa itu berasal dari Gowa, makanya kami melakukan klarifikasi kembali bahwa pasien positif itu berasal dari Gowa. Kami membuat kronologinya melalui rilis berita. Karena ada rentang pada saat itu, ya ini termasuk trial and error termasuk masa=masa inkubasi kan berkembang. Ada yang 2 kali masa inkubasi atau 28 hari. Ada juga yang menjadi 14 hari. Jadi ketika misalnya kita telusuri pada saat itu 2 kali masa inkubasi 14 hari makanya kalau menghitung 28 hari maka ia berasal dari ijtima Gowa. Jika ada warga lainnya terpapar sementara ia tidak dari ijtima Gowa maka sudah masuk transmisi local.

Jadi pada saat masanya ini tidak ada transmisi local. Artinya semua pasien tersebut pendatang misalnya dari Malaysia dan Pesantren.

Mereka dijemput atau dijemput atau diisolasi saja di Masjid tempat mereka menginap saat dating?

Ada dikirim ke Makassar di Hotel Wisata Covid program Gubernur. Jadi ini lebih kepada Pemerintah Gowa yang menolak bahwa warga yang positif di Bulukumba adalah cluster Gowa.

Akhirnya sampai pada istilanya begini, untuk mencegah informasi yang salah itu dengan cara merilis berita ya?

Intinya kita sebagai Tim Data informasi itu setiap ada data setiap ada orang positif itu kita rilis. Kita juga menyampaikan setiap saat kalau ada penambahan, hasil tracing, kegiatan-kegiatan pencegahan seperti penyemprotan disinfektan.

Pada saat awal itu yang menjadi persoalan di masyarakat mereka belum percaya adanya Covid, minimnya informasi, dan terlambatnya informasi hasil tes positif kepada keluarga, akhirnya mereka sampai pada kesimpulan bahwa pemerintah mengCovidkan. Kemudian sampai pada tahapan masyarakat merasa bahwa penanganan Covid itu seperti tidak ada standarnya hingga apada upaya penyediaan ruang isolasi di RSUD Bulukumba. Pada model-model kebijakan itu apakah sempat mendengar adanya Misinformasi dan Disinformasi?

Justeru yang kasus awal dari Malaysia, yang ada orang bergejala kemudian ada yang menyebabkannya yang dari Bonto Tiro kalau nda salah, kemudian teman-teman di rumah sakit itu karena dia tidak punya baju APD dia menggunakan jas hujan, sehingga itu jadi bullyan oleh nejtizen karena ada foto-foto sehingga dianggap pemerintah tidak becus menangani Covid.

Tapi begini, berdasarkan pengalaman yang pada akhirnya menjadi lelucon itu Covid. Yang lucu adalah protokolo kesehatan menjadi formalitas. Yan anti pada pertemuan resmi yang diliput baru menggunakan masker. Tapi kalau diluar itu ya orang bebas aja.

Apakah Pemerintah menerapkan sanksi khusus bagi yang melanggar?

Kalau edukasi itu sih Satgas setiap hari dan setiap pagi selalu melakukan razia di jalan untuk penggunaan masker.

Itu kan tadi terkait penyakitnya ya. Tapi kalau berbicara Covid kan isunya bisa macam-macam. Kalau Misinformasi dan Disinformasi terkait Vaksin yang sempat didengar?

Kalau vaksin itu ya, tapi ini tidak muncul di media ya, hanya dari mulut ke mulut bahwa yang vaksin asli itu ketika di rujab. Kalau bukan di rujab ya tidak asli. Jadi awal-awal vaksin itu mereka mau kalau di rujab. Padahal itu adalah informasi yang salah. Kemudian dibantah oleh Wakil Bupati pada saat itu.

Dulu orang vaksin karena banyak korban yang meninggal. Saat banyak orang meninggal Covid, maka ramai-ramailah mereka Vaksin. Tapi setelah kasus Covid melandai, itu orang tidak mau vaksin karena dipikir sudah tidak ada lagi tambahan dan meninggal. Itulah pemerintah sangat kewalahan dan tantangan berat melakukan sosialisasi vaksin. Sampai hari ini kan baru 60%.

Yang vaksin haram, orang tidak percaya vaksin itu sama perlakuannya ketika masyarakat tidak percaya Covid. Jadi Vaksin itu dianggap sesuatu konspirasi internasional, dianggap melemahkan masyarakat, umat islam, sehingga saya sebagai tim data di humas, setiap saat menyampaikan bahwa vaksin haram itu tidak benar. Kalau memang itu tidak benar ya, karena yang lebih didahulukan adalah TNI, nakes. Kalau dianggap sebagai upaya sistemik membunuh bangsa Indoensia. Jadi ya kalau memang tujuannya menghancurkan sebuah bangsa tidak mungkin mereka di vaksin. Dan itu memang tidak terbukti.

Itulah yang menjadi tantangan bagi kita untuk memberikan edukasi. Jadi edukasinya itu adalah setiap kesempatan pertemuan saya karena tim penyusun sambutan Bupati ya setiap saat saya menyampaikan itu dalam konsep sambutan di setiap momentum apakah hari raya, pada pertemuan-pertemuan kegiatan, disampaikan ke masyarakat untuk divaksin.

Saya merasa penting untuk menyisipkan pesan-pesan itu di kegiatan apapun. Apakah Maulid, penamatan, wisuda, informasi yang benar mengenai vaksin itu kita sampaikan.

Mis/Dis informasi itu diketahui darimana Pak? Atau barangkali apakah bapak mengamati informasi yang tidak benar yang beredar di sosial media?

Kalau saya lebih banyak dapat di media sosial. Dari orang-orang yang memang menjadi agen penolak. Masyarakat sudah terpetakan. Terpolarisasi yang sudah terlihat anti pemerintah kan sudah diketahui. Di akun facebook, baik itu beranda akun personal, kemudian grup-grup. Kemudian malah grup-grup whatsapp dia share informasi-informasi yang memprovokasi.

Termasuk ada dulu kasus seorang dokter, meski pada akhirnya dia minta maaf kepada IDI dan klarifikasinya dia share kembali secara luas. Jadi saya memang mengamati isu-isu yang berkembang di masyarakat di sosial media dan melakukan upaya counter. Jadi saya juga secara pribadi melakukan edukasi dengan itu. Kan lebih banyak hoaks. Jadi saya setiap saat membanggikan link informasi untuk meluruskan informasi salah tersebut.

Di kementerian kominfo kan memang ada data informasi hoaks itu, cek fakta, di satgas itu saling mendukung untuk membagikan informasi itu. Jadi kalau ada yang perlu diluruskan, kami membagikan link informasi yang benar. Baik melalui akun sosial media yang dikelola pemerintah, maupun pribadi saya.

Jadi, apabila saya melihat ada informasi yang salah baik itu di sosial media, maupun grup-grup whatsapp yang memang saya tergabung disitu, saya langsung meresponnya. Jadi akan ketahuan. Biasanya kalau saya counter begitu, yang bersangkutan tidak berkutik. Karena ada dalam bentuk foto juga, link berita.

Apakah pemerintah daerah memiliki tim cek fakta, ataukah ini merupakan upaya pribadi yang dilakukan sebagai bentuk inisiatif dalam melihat fenomena hoaks di masyarakat?

Inisiatif sendiri saja. Lebih kepada tanggung jawab untuk meluruskan. Tujuannya agar masyarakat yang memang punya kebiasaan menyebarkan informasi hoaks, menjadi tidak punya ruang dan kesempatan, kemudian untuk mengimbangi informasi-informasi yang salah. Kan ketika tidak segera diluruskan bisa dianggap benar. Makanya harus. Kalau saya pribadi ya seperti itu.

Apakah memang dilakukan upaya menginventarisir isu-isu dan juga akun sosial media baik personal maupun grup yang memang massive dalam menyebarkan informasi yang tidak benar?

Yang saya amati ya bukan Bulukumba saja. Karena sebenarnya Covid ini sampai pada isu-isu karena dia memang anti pemerintah ya sudah. Yang melakukan itu ya mungkin pada pemilihan presiden lalu bukan pendukung pemerintah ini.

Jadi bapak melihat pelakunya adalah orang yang sama ya meski mungkin sulit dideteksi karena bisa jadi pada akun media sosial yang digunakan bukan identitas sebenarnya ya?

Ada orang per orang yang kita tahu, memang saat itu bukan pendukung pemerintah saat ini. Jadi akun asli. Jadi kan kelihatan polarisasinya. Jadi saya sebagai bagian dari pemerintahan tentu harus berkontribusi. Bahkan juga ada ASN

Padahal jika memang mereka menggunakan akun asli dan diketahui telah menyebarkan informasi yang tidak benar, bisa saja kan dilakukan upaya hukum untuk menindak. Ada tidak langkah seperti itu?

Tidak. Lebih kepada meluruskan saja. Ruang publik yang ada di media sosial itu kan lebih terbuka. Kecuali yang kasus pertama itu ya. Dan ini masih ada kaitannya dengan kasus positif pertama di Bonto Masila. Saat itu isteri wakil Bupati sempat membesuk namun tidak mengetahui kalau pasien tersebut positif. Akhirnya setelah diketahui Wakil Bupati dan isteri tentu menjadi kontak erat sehingga harus di swab dan hasilnya negatif. Postingan ibu wakil bupati di medsos mengenai hal ini kemudian ditanggapi oleh salah satu media online. Pedoman rakyat kalau tidak salah. Setelah itu saya telusuri untuk diluruskan. Judul Berita “Wakil Bupati Terjangkit Namun Tidak Positif” itu kan adalah berita yang bisa membuat orang panic. Karena Wakil Bupati kan banyak yang menemui. Dan itu harus diklarifikasi. Dalam proses klarifikasi itu ternyata saya dapati bahwa itu media yang tidak jelas dalam arti tidak jelas alamatnya, nomornya juga tidak asli. Saya juga sempat WA dan bertanya wartawan apa karena dimedia tersebut mencantumkan nomor yang setahu saya smartfren. Saat itu saya meminta untuk diperbaiki. Tapi karena tidak ada niat baik saya lapor ke polisi UU ITE saat itu bersama Kabag Hukum. Saya dikasih kuasa oleh wakil Bupati untuk kemudian membuat laporan dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran pada media-media yang seenaknya memberitakan.

Kemudian temuan kita adalah media tersebut bukanlah media yang dikelola secara profesional. Dia memang hanya media yang tujuannya click bait kemudian yang kedua bisa jadi, kemudian saat itu kan juga jelang pilkada. Jadi kemungkinan ada upaya-upaya menjatuhkan orang. Jadi ya sudah jelas, kita tahu siapa yang ada dibelakang media tersebut.

Jadi karena ini adalah sebuah yang seharusnya punya tanggungjawab menyampaikan informasi yang benar maka pemerintah melakukan langkah hokum dengan melaporkan. Sementara melalui media sosial yang dilakukan oleh personal, upaya bapak lebih kepada meluruskan saat itu juga dengan menanggapi postingan dengan harapan yang bersangkutan paham. Jadi sebenarnya hanya untuk mengimbangi. Sebenarnya bisa jadi dia tidak jera, tapi minimal pembaca yang ada di grup itu mendapatkan informasi yang berimbang. Misalnya ada grup, trus dia mengshare, bisa jadi orang itu tidak menjadi sadar, tapi minimal anggota grup yang lain mendapat informasi yang benar untuk meluruskan informasi itu.

Jadi meskipun bapak tidak mengetahui apa sih motif dari menyebarkan, terlepas dari tujuannya apakah sengaja, atau tidak tahu, hanya mengimbangi saja ya?

Iya, contohnya kan itu mengcovidkan orang, maka diluruskan bahwa tidak. Itu benar dari hasil laboratorium

Masuk ke poin strategi ya pak. Dalam penyampaian informasi terkait penanganan Covid khususnya yang spesifik mengenai mis/dis informasi, siapa saja kah yang dilibatkan oleh pemerintah?

Jadi kan di Pemerintah, kita membentuk satgas covid. Jadi supaya informasi yang keluar ada yang tanggung jawab maka ditunjuklah juru bicara sebagaimana yang ada di provinsi dan pusat. Jubir inilah yang setiap saat mengklarifikasi, menjelaskan tentang perkembangan Covid termasuk informasi-informasi yang mis dan dis. Tetapi jubir yang dalam hal ini Pak Kadis Kominfo tidak berdiri sendiri. Dia dibantu termasuk oleh saya di Bagian Humas Protokol untuk menyajikan data apa yang harus disampaikan terkait yang dialami beberapa kondisi yang ada pada saat itu. Apakah itu orang meninggal covid, apakah itu orang yang menolak dirawat covid, apakah itu yang menolak di positifkan covid, itu semua yang menjadi hal yang penting diklarifikasi dijelaskan oleh juru bicara.

Jadi juru bicara itu menjelaskan ke media. Jadi saya sebagai pihak yang membantu jubir itu yang membantu membuat narasi untuk meluruskan

yang selama ini menjadi simpang siur di masyarakat. Baik itu di media massa maupun media sosial. Tapi yang paling cepat kita respon itu adalah media sosial. Karena masyarakat langsung, meski kadang dari media sosial baru ditangkap oleh media massa dan teman-teman media online.

Jadi jubi itu Kadis Kominfo Bapak Muhammad Daud Kahal. Jadi kami punya grup khusus diluar gurp besar Satgas, ada tim data covid itu kita bicarakan disitu. Kita bicarakan semua, terkait orang meninggal, data perkembangannya. Semua aktifitas terkait bahan untuk diolah itu ada di Tim Data. Jadi ada dari unsur pemerintah daerah, ada teman-teman TNI, yang intelejen, jadi cepat informasinya. Jadi agak mudah kerja-kerjanya untuk mengklarifikasi karena biasanya teman-teman di kepolisian itu lebih cepat, lebih akurat dia punya informasi. Jadi laporan intelejen di respon untuk diluruskan oleh jubi dalam bentuk rilis, dalam bentuk penyampaian langsung video, disampaikan melalui grup-grup media.

Misalnya dulu, karena kita di grup itu mau mengantisipasi, karena begini biasanya ada informasi awal dari TNI bahwa ada kerumunan misalnya pada saat pemakaman Covid yang ditunggu, jadi kita bisa antisipasi menjelaskan kondisinya berdasarkan informasi dari intelejen. Karena kita ini, tidak semuanya di lapangan. Kita ini sebagai humas atau jubi ini tidak berada di lapangan, jadi kita mintakan keterangan dari teman-teman yang ada di lapangan, yang dalam hal ini TNI atau polisi.

Jadi bisa dikatakan disini informasi yang sifatnya mis dan dis tadi diperoleh bukan hanya melalui pengamatan isu-isu di sosial media tapi juga informasi dari intelejen yang bekerjasama tadi?

Iya. Karena kita kan satgas. Jadi saling bekerjasama. Jadi teman-teman juga TNI juga merilis data yang berdasarkan kita dari Dinas Kesehatan. Saling membantu begitu. Misalnya kalau mereka membutuhkan data, kita memberikan data tentang jumlah kondisi Covid. Misalnya meninggal, tambahan, dsb. Itu tidak mungkin mengambilnya dari tempat lain kecuali dari kita sendiri dari tim surveillance.

Karena tidak dipungkiri ada mis dan dis informasi yang juga diperoleh melalui sosial media, apakah rilis atau informasi yang telah terverifikasi, terklarifikasi oleh pihak-pihak yang kompeten disebarluaskan kembali melalui sosial media?

Iya. Biasanya Facebooknya Pemkab, link-link beritanya. Begini kan. Informasinya lebih cepat juga lewat grup-grup whatsapp. Jadi link berita yang terkait klarifikasi itu diedar di grup-grup WA. Jadi mudah.

Jadi prosesnya itu bapak mengeluarkan rilis, kemudian media diharapkan akan memuat. Tapi kan tidak bisa dipastikan ya pak karena tidak ada kontrak kerjasama?

Ya tidak ada. Tapi kalau isunya seksi kan dia akan muat. Nanti dia juga akan share link beritanya. Teman-teman media kan sekarang tidak hanya menulis dan memuat. Tapi dia mempromosikan link berita yang menjadi isu pada saat itu.

Siapa saja yang menjadi target sasaran atau khalayak informasi tersebut dengan mempertimbangkan latar belakang masyarakat? Bagaimana pemerintah memilah dan memformulasikan bentuk informasinya, model penyebarluasannya?

Khalayk itu kan bisa dikategorikan saja. Meski sebenarnya tidak bisa dibuat garis lurus bahwa berbeda, misalnya masyarakat kota dengan yang ada di desa. Tapi semua perkembangan itu kan berdasarkan laporan yang ada di grup satgas. Dalam perkembangannya kemarin itu anggota grup satgas aktif melaporkan terkait situasi-situasi yang terjadi. Kita melaksanakan perintah. Jadi apapun itu misalnya, kemarin kan sempat ada posko di perbatasan itu ada laporannya setiap saat, sehingga kita bisa pantau. Misalnya saat pemantauan ada masyarakat yang tujuannya ke satu desa tertentu, makanya kita laporkan kesitu.

Terkait mengenai khalayak itu, intervensi masyarakatnya itu melalui pemerintah setempat melakukannya. Jadi bukan Jubir atau pemerintah di kabupaten, tapi yang datang memberikan edukasi ke masyarakat tersebut ya berdasarkan tingkatan ya. Ada Kabupaten, Kecamatan, kemudian Desa/Kelurahan jadi pemerintah setempat inilah yang memiliki tanggungjawab meluruskan kebijakan dan informasi yang harus diluruskan. Jadi kana da camat dst, jadi perintahnya disitu.

Misalnya, kemarin ada penolakan warga terhadap masyarakat Baturopa. Pemerintah setempat bersama tim posko disana yang tanggung jawab juga dengan psukesmas Borong Rapoa yang memiliki tanggung jawab melakukan edukasi. Jadi dia turun melakukan edukasi kepada masyarakat yang resisten terhadap itu. Dibantu oleh teman-teman babinkamtibmas. Jadi dia sifatnya komunikasi langsung nda melalui media. Untuk memberikan edukasi.

Apa yang menjadi pertimbangan dengan memilih metode komunikasi secara langsung?

Kan informasinya kasuistik. Maksud saya yang kita tangani itu yang kita anggap punya resistensi dalam hal upaya pencegahan dan pengendalian Covid. Misalnya ada penolakan mau di bawa ke Makassar atau di swab, itu yang kita diskusikan kemudian turun langsung. Jadi memang tidak ada semacam memilih untuk itu. Jadi dia sifatnya penolakan secara langsung untuk orang-orang yang tidak memahami situasi terkait covid itu. Mereka kan membaca situasi dan mendapatkan informasi dari berbagai, siapapun yang terkait covid. Ketika misalnya itu terjadi pada dirinya maka berusaha mempertahankan pendapatnya. Disitulah perannya teman-teman babinkamtibmas, babinsa bersama petugas kesehatan untuk turun langsung memberikan edukasi dan rata-rata itu diselesaikan dengan baik.

Ada juga yang kasus yang sering terjadi juga di rumah sakit. Ketika ada pemaksaan, pulang paksa tanpa ada pemulasaran ketika dia meninggal covid. Nah itu yang kadang sangat butuh penjelasan dari teman-teman dari dinas kesehatan, rumah sakit, dan aparat TNI/Polri.

Penolakannya karena apa itu?

Karena dia menganggap lebih kuat dorongan tradisi bahwa orang meninggal ya disemayamkan. Itu hal yang tiba-tiba berubah makanya mereka menolak.

Jadi bisa disimpulkan apabila informasi salah tersebut diperoleh melalui media, maka akan langsung di luruskan dengan memanfaatkan media juga ya Pak, dan apabila informasi yang salah langsung disampaikan oleh masyarakat maka akan diluruskan pula secara langsung oleh posko daerah atau pemerintah setempat?

Iya begitu.

Siapa saja pihak yang tergabung dalam penyusunan pesan/informasi di tim data yang tadi bapak sebutkan?

Saya sebagai bagian dari Humas, Kadis Kominfo sebagai juru bicara, jadi orang yang terlibat itu lengkap. Maksud saya begini, sesuai dengan latar belakang yang terkait, ada Faisal dari tim surveilliance dinas kesehatan, dan beberapa teman-teman TNI Polri. Itu yang saling memberikan support data terkait perkembangan yang terjadi. Jadi ini lebih kepada grup koordinasi terkait langkah-langkah dan penyusunan informasi yang akan kita lakukan. Jadi untuk memudahkan kerja-kerja kita. Artinya begini, seluruh tim yang ada

disini semua memantau media sosial. Semua yang berkejolak itu kita pantau, kemudian kita teruskan. Jadi ada begini, teman-teman yang sifatnya teknis di lapangan seperti dinas kesehatan, cenderung tidak memperhatikan media sosial, sedangkan kita, itu focus. Misalnya kemarin ada warga yang meminta, karena anaknya diisolasi maka dia tidak bisa ke pasar, makanya dia butuh pertolongan, dan itu muncul di media sosial. Dan itu langsung kita antisipasi, langsung turun ke masyarakat. Misalnya pak camatnya turun memberikan bantuan. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti untuk memberikan pertimbangan bahwa ini ada kejadian begini dan itu harus disikapi lebih cepat.

Bisa dikatakan bahwa dalam menginventarisir isu, perolehan data, hingga penyebaran informasi, disesuaikan dengan latar belakang masing-masing yang ada di tim data ya?

Iya. Jadi humas mengelola media dan sosial media, kemudian intelejen mendapatkan informasi langsung dari masyarakat, dan tim surveillance yakni terkait teknis kondisi objektif yang dipersoalkan. Misalnya data simpang siur apakah covid atau tidak. Yang menentukan itu teman-teman dari surveillance, termasuk menjelaskan secara teknis secara medis, bahwa sebenarnya apa yang terjadi.

Dalam menyusun pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat tadi, tentu fungsi mengkomunikasikan disini lebih banyak diambil perannya oleh Kominfo dan Humas itu tadi ya, seperti apa itu bentuk pesan yang dikeluarkan?

Kan ada data setiap saat, setiap hari. Itu data perkembangan Covid tambahan. Itu yang mudah dibaca. Jadi di data setiap saat itu, ketika misalnya dia sifatnya agak sedikit punya nilai berita atau interest terhadap situasi itu, itu yang kita sampaikan obyektif. Ada penambahan ini dan ini ditemukan disini. Tapi kalau misalnya ada tambahan 1 itu tidak. Jadi tidak setiap hari juga kita merilis. Jadi ada data infografis, terkait perkembangan Covid. Jadi kalau misalnya ada penambahan yang cukup, itu yang terus kita kawal. Termasuk ketika ada nakes yang terkena, itu juga menjadi interest untuk disampaikan. Kemudian ada jumlah yang tiba-tiba besar. Secara berkala kita laporkan perkembangannya. Mulai dari isolasi, diberangkatkan ke Makassar yang program wisata covid provinsi, kemudian dipulangkan ketika dia sembuh, itu kita kemas dalam bentuk informasi. Misalnya orang yang sudah sembuh, kan masih banyak yang menolak dibawa ke Makassar, tapi kan misalnya kita wawancara dengan yang bersangkutan, apa fasilitas

yang diterima, bagaimana kondisinya disana selama karantina itu yang kita angkat. Sehingga itu memberikan cerita kepada warga terkait program itu.

Jadi bentuk informasinya itu rilis, data infografis harian, kemudian rilis ketika ada perkembangan yang signifikan. Jadi rilis ini informasinya macam-macam. Kadang hanya berupa informasi umum terkait covid, update data, atau ketika ada kejadian atau kasuistik. Jadi terkadang ketika dia sifatnya tiba-tiba sangat krusial, jadi biasa kalau bukan kadiskominfo atau kadis kesehatan langsung yang memberikan keterangan dengan direkam video untuk disebarluaskan di berbagai media untuk megcounter isu yang ada.

Bapak di bagian humas, dalam mencermati fenomena dimana masyarakat telah menjadikan sosial media juga sebagai sumber informasi yang mereka yakini, seberapa besar urgensinya pemerintah untuk dapat mengamati pemanfaatan media sosial itu sendiri khususnya terkait mis/dis informasi?

Kan begini, di era digital begini, di era media sosial saat ini, semua hal itu memungkinkan masyarakat sampaikan. Baik yang bersangkutan maupun pihak-pihak lain yang menyampaikannya melalui media sosial. Nah itu yang menjadi hari ini makanya sangat penting kita selalu siap mengantisipasi, kejadian-kejadian yang diviralkan. Kita juga bisa membuat langkah hukum ketika memang, kan banyak juga orang yang tidak sehat cara bermedia sosialnya, dia tidak paham atau apa. Sehingga itu bisa kita kasih pembelajaran. Seperti dilaporkan ke polisi. Meski juga kami juga punya pengalaman di tim media satgas ini di lapor ke polisi karena ada pihak keluarga yang tidak menerima orang tuanya disebut namanya ketika meninggal Covid. Kami sebut di rilis karena kita anggap bahwa dia ada, meski itu akan menjadi perdebatan apakah itu termasuk dalam rahasia pasien, tapi dalam undang-undang penanggulangan Covid itu kan juga dibenarkan supaya orang antisipasi.

Ini sebenarnya berkaitan dengan uji awal materi komunikasi, tentang bagaimana pemerintah mengupayakan dalam memformulasikan pesan itu tidak ada pelanggaran. Jadi apa saja sih yang menjadi pertimbangan yang menjadi keputusan pemerintah mengenai apa saja yang akan disampaikan terbuka ke masyarakat?

Jadi kalau dia sifatnya tokoh dapat memengaruhi publik, itu kita jelaskan. Masalah Covid ya. Kenapa kami menyebut nama, karena dia adalah tokoh yang menurut kami masyarakat perlu tau. Beda halnya kalau masyarakat biasa misalnya. Alasannya karena seperti gaya media saat ini, kalau itu tokoh

maka layak diberitakan. Karena diharapkan masyarakat menyadari bahwa siapapun bisa kena. Bahkan seorang tokoh sekalipun begitu. Cuma memang masyarakat masih menganggap terkena Covid sebagai sebuah stigma yang buruk. Padahal ini hanya virus biasa yang bisa kena siapa saja. Namun jika menganggap itu sebagai aib maka menjadi keberatan.

Apakah dengan adanya kasus tersebut kemudian merubah pemerintah tentang cara penyampaian terkait siapa saja yang terkena Covid?

Sebenarnya karena kita sampai di lapor ke polisi menjadi pengalaman. Akhirnya juga diselesaikan secara kekeluargaan. Yang melapor ini juga pihak keluarga yang seorang anggota polisi. Kami sempat diperiksa tapi berkahir dengan damai. Tapi kami tetap berkeyakinan bahwa langkah kami tersebut sesuai atas berbagai pertimbangan. Karena penanganan Covid ini ya itu tadi, masih trial and error. Belum pernah dialami sebelumnya. Dan jika kita bandingkan dengan media-media nasional kan mereka menyebut jika itu tokoh.

Jadi setahu saya memang nama pasien itu bisa disebutkan untuk mencegah penularan. Cuma masyarakat ya belum bisa menerima. Padahal maksudnya jika diketahui demikian maka diharapkan masyarakat tidak perlu melayat. Mencegah adanya pertemuan dengan kontak erat. Itu kan tujuannya. Dan itu memang benar. Karena setelah tahu Covid, orang tidak datang melayat. Faktor-faktor itulah yang menjadi pertimbangan untuk disampaikan.

Saya sempat mendapatkan data penyajian pasien covid dalam sebutan angka. Apa tujuannya itu pak?

Iya betul, itu adalah register. Pasien nomor sekian dan seterusnya. Tapi da memang pertentangan antara undang-undang kesehatan dan kedaruratan. Dimana menurut UU kesehatan itu dirahasiakan, sementara UU kedaruratan karena untuk kepentingan masyarakat jadi bisa disebutkan nama. Jadi kami memang tidak membuka semua data nama-nama karena mempertimbangkan kekhawatiran masyarakat terkait aib dan stigma.

Apakah pemerintah khususnya di Tim Data, mengamati ada tidaknya pengaruh yang signifikan ketika upaya atau strategi yang telah dilakukan telah membawa efek tertentu?

Tidak. Kami tidak melakukan upaya mengukur keberhasilan karena tidak ada indicator untuk mengukurnya. Dan sepertinya juga yang kami lakukan belum tentu benar. Maksudnya begini, itu berjalan alami sesuai kapasitas sumber daya yang kita miliki dan kita sudah menganggap itu upaya terbaik. Tapi kan

ketika misalnya pandangan orang terkait Covid itu kan semakin kesini semakin berubah. Ada awalnya ketakutan, ada yang percaya semakin percaya, bahkan justru ada yang dulunya percaya sekarang justru tidak percaya. Itu berdasarkan referensi-referensi yang mereka dapatkan dari berbagai pihak. Bukan hanya referensi dari pemerintah. Kalau pemerintah kan standar mulai dari pusat sampai daerah. Tapi kan ada juga pihak lain yang menentang.

Jadi tidak dilakukan pengujian atas upaya pemerintah itu ya?

Efek itu kita anggap ada reaksi, reaksinya itu misalnya dalam bentuk perilaku. Hanya itu. Sepanjang tidak ada dia bertindak atau apakah dan sebagainya terkait tindakan, itu kita anggap tidak berefek.

Ada tidak upaya memobilisasi kelompok berpengaruh dalam upaya menggerakkan masyarakat untuk mengerti, memahami, dan menerima informasi yang disampaikan?

Ya kita sering melakukan itu. Dengan tokoh agama. Karena tokoh agama misalnya terkait shalat idul fitri, shalat berjamaah, itu harus kita libatkan tokoh agama supaya masyarakat manut. Bahwa yang dilakukan pemerintah ini untuk menyelamatkan masyarakat. Sementara terkait larangan berkerumun itu ada satgas. Jika melanggar ada penindakan. Ada Satpol PP dan kepolisian.

Ada tidak anggaran yang dialokasikan khusus dalam penanganan ini?

Tidak ada. Anggaran yang sempat saya singgung kemarin ya anggaran humas saja. Yang untuk media luar ruang itu yang saya gunakan untuk Covid. Ada sekitar 20 buah baliho. Untuk 10 kecamatan, ada didalam kota 10 juga ukuran 4x2. Nilai cetakannya itu kalau tidak salah 350 ribu per baliho. Isinya memusat pesan prokes. Dan ini sebenarnya memang bukan untuk Covid tapi karena yang dibutuhkan saat ini adalah terkait itu.

Sementara kalau untuk kerjasama media itu kami tidak ada. Dia hanya kerjasama media biasa, kalau isunya adalah covid ya kebetulan saja. Kan klo Covid ini kan ada alokasi anggaran refocusing, dan kami tidak dapat anggaran terkait komunikasinya. Hanya ke Dinas Kesehatan yang teknis.

Koordinasi implementasi pelaksanaan kegiatan biasanya dilakukan dengan cara bagaimana?

Tidak ada rapat tertentu. Kita hanya membahas secara umum saja. Kita hanya rapat ketika ada masalah. Ada hal yang ingin dilakukan. Na itu baru

rapat. Dan sampai sekarang SK Satgas masih berlaku karena belum dicabut. Jadi upaya itu masih berjalan. Tidak ada batasan rentang waktu jadi tidak ada juga upaya mengevaluasi program. Lagipula Covid ini kan belum ditahu kapan berakhirnya.

Apakah pemerintah sudah menaruh perhatian tentang pentingnya penanganan Mis/Disinformasi terkait Covid 19?

Tergantung perkembangan situasi Covid itu sendiri sebenarnya. Dulu kita melawan hoaks Covid yang tidak percaya. Nah itu ketika fases-fase penanganan Covid. Tiba di masa adanya vaksin, di bulan dua 2021 itu lain lagi isunya. Apakah vaksin itu efektif, yakin atau benar hal penanganan Covid. Inilah yang menjadi isu kedua penanganan Covid. Contohnya hari ini, kita kewalahan bahagaiman mengajak masyarakat untuk vaksin. Karena sebagian masyarakat memang tidak percaya efektifitas vaskin itu. Bisa karena mereka yakin akan bisa sembuh sendiri, atau vaksin itu adalah upaya pihak luar untuk menggerogoti bangsa Indonesia. Sehingga pemerintah harus tegas seperti penerima banso tidak boleh menerima bansos ketika belum vaksin.

Jadi menurut bapak yang menghambat itu apa dalam hal menekan begitu banyaknya informasi salah?

Saya sendiri sebenarnya agak bingung ini. Dari sisi misalnya kita harus vaksin karena Covid berbahaya. Tapi 3 bulan terakhir ini tidak ada penambahan. Pertanyaannya kemudian kalau tidak ada penambahan berarti tidak ada covid. Lantas kenapa harus vaksin? Nah ini yang menjadi permasalahan internal ini kita dalam mengajak masyarakat untuk vaksin. Kita disatu sisi mengajak vaksin tapi kenyataannya memang tidak ada penambahan Covid.

Tapi tidak adanya penambahan itu apa tidak bisa dilihat dari tidak dilakukannya upaya tracing seperti yang pernah dilakukan secara massif sebelumnya?

Bisa iya bisa tidak. Kayak di Jakarta misalnya ada memang varian baru. Kalau kasusnya di 2020 itu akhir itu kan begini, kalau memang Covid itu berbahaya, semua orang akan bermuara di rumah Sakit. Ketika dia sakit, dia bergejala, dia akan berobat ke rumah sakit. Pasti dia akan di swab. Pertanyaannya, kan sekarang semua orang sakit, setiap saat orang ke rumah sakit, tapi kan dia tidak terdeteksi Covid. Itu bagian bukan dari tracing ya. Tapi datang sendiri ke Rumah Sakit. Kan dulu orang banyak Covid karena

ditemukan di rumah sakit. Kita tidak datang swab ya tapi di rumah sakit. Itu juga ya ketika banyak orang meninggal maka orang menjadi ketakutan. Makanya orang banyak vaksin pada awal-awal itu karena banyak orang covid karena takut meninggal. Sekarang kondisinya berbeda lagi. Karena tidak ada orang meninggal, tidak ada tambahan Covid lalu untuk apa covid. Tapi memang tidak ada tracing ya. Tapi dulu itu memang tanpa tracing ya ditemukan di rumah sakit. SOP nya kan di rumah sakit harus di swab baru dikirim.

Jadi sebenarnya tantangan terbesarnya itu dalam Mis dan Disinformasi itu apa menurut bapak?

Kan begini. Mis/Dis informasi ini kan banyak terjadi di media sosial. Di ruang-ruang media maya. Nah ruang itu kan berbeda dengan yang ada di ruang publik yang maksudnya nyata. Karena kenapa, di dunia maya itu tidak ada batas geografis, bisa jadi dia akun palsu, bisa jadi anonym. Nah ini yang kesulitannya disitu. Tiba-tiba muncul misalnya. Itu agak susah. Kecuali memang teman-teman di kepolisian ya. Yang melakukan pengusutan dan lain sebagainya. Tapi kalau di pemda itu agak susah. Karena masyarakat itu kita gak tahu. Kecuali kalau dia tokoh ya, kita bisa pendekatan. Diskusi langsung. Tapi bagaimana orang yang kita tidak kenal, tidak jelas siapa. Belum tentu juga ada di Bulukumba. Bagaimana caranya mengedukasi kalau dia bukan di Bulukumba.

Tapi kan meski dia mendapatkan melalui sosial media, yang bersangkutan juga bisa menyampaikannya ke orang lain tanpa perantara media. Misalnya saat bertemu di warkop. Kan bisa seperti itu rantai penyebarluasannya. Bagaimana menurut bapak?

Tapi untuk hal seperti itu menurut saya agak susah treatmentnya. Kita belum punya kemampuan begitu. Karena yang namanya Mis/Dis informasi itu berdasarkan kapasitas orang tersebut. Referensi yang didapat orang tersebut. Misalnya dia Mis karena punya referensi yang sangat minim misalnya. Dia da punya daya nalar yang bagus misalnya. Kan begitu. Sangat situasional. Berbeda ketika penyampaiannya langsung kita bisa diskusi. Direspon cepat. Tapi kalau di dunia medsos kita tidak punya banyak waktu untuk meladeni karena banyak dan cepat. Selain itu, kami tidak memiliki tenaga khusus untuk mengelola itu, misalnya orang yang memang punya peran untuk memberikan edukasi melalui media sosial. Misalnya khusus mencari orang seperti itu lalu memberikan pemahaman. Tidak ada. Kami tau bahwa Mis/Dis informasi punya potensi berbahaya. Tapi kan bisa

jadi tanpa kita treatment, tidak ada juga jaminan bahwa dia akan berhenti, tidak ada juga jaminan dia akan terus melakukan itu.

Jadi dengan segala keterbatasan itu, yang bisa kami lakukan adalah membagikan informasi yang benar yang sifatnya kebijakan. Kan misalnya begini, misalnya informasinya viral yang nasional, maka pihak nasional sendiri yang memberikan klarifikasi. Kita di daerah yang bantu share. Misalnya dari pusat sudah mengeluarkan pernyataan terkait itu. Karena kita bukan pakar. Pakar itu dari pusat.

Baik pak terimakasih atas waktu dan informasi yang diberikan. Semoga sehat selalu.

| | |
|-------------------|--|
| Nama | : Nurisdah, S.KM, M.Kes |
| Pekerjaan/Jabatan | : Kasi Promkes Dinas Kesehatan |
| Hari/Tgl. | : Selasa, 25 Januari 2022 |
| Tempat | : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba |

Apa tugas Promkes Dinas Kesehatan dalam Penanganan Covid 19?

Kita diminta untuk turun langsung ke masyarakat untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan. Khususnya kemarin pada saat capaian vaksin masih sangat rendah. Jadi kami di promkes kan punya mobil, jadi kami setiap hari memberikan penyuluhan mulai dari kota Kecamatan Ujung Bulu, kita keluar. Kita masing-masing mempunyai binaan, atau pemantauan di masing-masing kecamatan. Dibentuk Tim di Kabupaten Dinas Kesehatan. Tapi setelah kita selesai melaksanakan kegiatan itu, tapi masih ada kecamatan lain yang capaiannya rendah, maka kami juga bergerak.

Dari hasil pemantauan tersebut, apa saja temuan di masyarakat yang menyebabkan rendahnya capaian vaksin tersebut?

Yang pertama itu, karena ketidaktahuan masyarakat tentang manfaat vaksin. Kemudian banyaknya isu-isu yang mereka terima di media sosial, sehingga mereka takut. Orang tua tidak mengizinkan untuk diberikan vaksinasi baik itu kepada anak sekolah maupun keluarganya sendiri. Memang masyarakat membutuhkan semacam penguatan, kemudian terkait dengan penyuluhan-penyuluhan.

Sebelumnya saya sempat mendapatkan informasi, bahwa promkes juga ada di tiap puskesmas kecamatan. Bagaimana keterkaitannya dengan yang ada di Kabupaten?

Kalau di Puskesmas itu bu, masing-masing program kan terlibat. Cuma mereka terbatas. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di Puskesmas mereka ada tim vaksinasi, ada juga tim penyuluh. Nah penyuluhnya ini yang kurang. Jadi kalau kita dari Dinas Kesehatan kan kita punya fasilitas. Sedangkan di Puskesmas kurang. Andaikata mereka punya promkes kit, ada televisi dan microphone, maka itu bisa dipakai keliling untuk melakukan penyuluhan ke masyarakat. Jadi informasi itu sampai mereka, spanduk, kemudian baliho, nah mereka itu kekurangan. Jadi ada seperti layar tancap. Itu promkes kit ada layarnya. Kemudian kita membuat video-video yang mestinya diputar kayak pasar, di kecamatan, keramaian-keramaian. Tapi karena kita di Puskesmas ini tidak punya, akhirnya dari Dinas Kesehatan sendiri Cuma mobil saja. Jadi kita halo-halo saja keliiling.

Kalau tim yang di Kabupaten Ibu, timnya terdiri dari siapa saja?

Semua kepala Bidang, Kepala Seksi, termasuk staf. Jadi mereka punya daerah binaan. Jadi timnya ini diberi target. Percepatan capaian vaksin. Mereka diberi kartu screening yang berisi identitas pasien dan terkait dengan masalah kesehatannya. Jadi setelah selesai itu kita ambil dan kita input di kantor bupati. Setelah diketahui kondisi kesehatannya jadi baru bisa divaksinasi. Jadi selain penyuluhan juga ada target capaian vaksin

Informasi apa yang diberikan oleh tim promkes?

Tentang lokasi pelaksanaan vaksin di tiap daerah seperti kelurahan, kemudian sasarannya siapa, disampaikan kepada seluruh masyarakat. Jadi ada tentang usia yakni 14 tahun keatas dan harus dalam kondisi sehat. Kemudian terkait jadwal itu senin sampai dengan sabtu, dan lokasinya tersebar dimana-mana secara bergiliran di tiap kelurahan. Kemudian kita sampaikan mengenai manfaatnya vaksin, serta apa kerugiannya kalau tidak mau divaksin, seperti itu.

Bagaimana respon masyarakat?

Masih ada yang menolak. Dan itu kami anggap karena belum paham. Jadi selanjutnya kami melakukan grebek vaksin dengan menyampaikan secara langsung ke sasaran bahwa vaksin adalah sebuah keharusan dan bermanfaat untuk menangkal penyakit karena akan membentuk antibody. Tapi jika tidak mau maka kemungkinan besar dapat tertular, apalagi jika daya

tahan tubuh menurun. Jadi seringkali juga terjadi perdebatan. Karena mereka mendengar informasi, melalui televisi bahwa setelah vaksin ada yang mati. Tapi kami yakinkan bahwa itulah gunanya screening. Jika bapak ibu dalam kondisi sehat, insyaallah akan baik-baik saja. Jadi memang harus secara persuasive. Alhamdulillah setelah diberi pemahaman akhirnya mereka mau. Berbeda memang hasilnya, jika kita menyampaikan secara umum dengan metode konseling. Karena kita mendengar langsung, kalau misalnya mereka tidak mau, bisa langsung kita tanya apa masalahnya.

Dari tim promkes Kabupaten, kan banyak diantaranya bukan dari latar belakang Promkes. Seperti apa persiapan atau pembekalan sebelum turun ke lapangan?

Kan kita sudah banyak mendengar di media, sudah membaca. Jadi kita di orang Kesehatan itu, walaupun bukan promkes, misalnya kesehatan lingkungan, itu kan dipelajari terkait dengan preventif. Jadi pelayanan dasar juga otomatis kan bidangnya. Kemudian di psdk itu kan bermacam-macam latar pendidikan. Masing-masing kami latar belakang pendidikan di Dinas Kesehatan ada istilahnya preventive, promotif, dan rehabilitasi. Otomatis kita mempunyai ilmu untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan. Di semua bidang pasti ada, dan minimal sudah pernah mendengar, pernah membaca jadi otomatis bisa melakukan.

Terkait informasi yang akan disampaikan saat melakukan penyuluhan, apakah terlebih dahulu ada perencanaan, seperti rapat persiapan?

Rapat juga, di ruangan Kadis, dan disitu disampaikan bagaimana supaya percepatan itu, dan angka masyarakat yang mau divaksin semakin meningkat, sehingga kita ini betul-betul harus bekerja secara maksimal. Jadi target itu harus dilihat. Yang dari rendah itu bagaimana upayanya ini Dinas Kesehatan untuk mempercepat target itu bisa tercapai, dari kami masing-masing tim itu bersemangat. Karena kasihan masa Bulukumba tidak bisa. Apalagi ini program nasional untuk kepentingan masyarakat.

Kalau yang dilaksanakan belakangan ini kan lebih gencar tentang vaksin, bagaimana saat awal-awal Covid 19 di Bulukumba?

Jadi saat awal-awal itu kami menyampaikan terkait prokes ya. Karena kan masyarakat saat itu memang banyak yang masih tidak percaya. Karena setelah kami jalan-jalan ke bawah, ke pasar, mereka tidak pakai masker. Padahal itu salah satu upaya mencegah agar tidak tertular. Justeru kita berdebat. Misalnya saat ada pemeriksaan masker itu mereka pakai. Tapi

setelah kita kembali, ya sebagian juga awal-awalnya. Tapi saat melonjak itu kasus, baru mereka mau pakai. Jadi tantangan diawal itu karena masyarakat tidak percaya. Kemudian kitan kan belum turun penyuluhan. Apalagi di tempat-tempat wisata itu betul-betul, kayak di Bira. Jadi pada saat Desember kemarin 2020, kami ke wisata itu ada sekitar satu minggu. Menyampaikan untuk menerapkan prokes. Kami setiap hari turun karena melonjak. Di Bira pada waktu itu melonjak karena liburan. Jadi ada instruksi dari dari Gubernur dan Bupati menyampaikan bahwa Promkes harus turun untuk memberikan penyuluhan terkait dengan prokes. Kemudian kami juga turun itu di pasar-pasar 10 kecamatan. Jadi ditambah lagi sekolah, kemudian desa lagi yang kita kunjungi.

Jadi di tahun 2021 kami maksimal turun ke lapangan karena di 2020 kan belum ada. Namun memang sebenarnya harapan kami anggaran di promkes jangan ada di refocusing. Dan itu terjadi di 2021. KIE itu kami anggarkan sebanyak 96 kali yang artinya kami 2 kali turun ke lapangan akhirnya menjadi 2 kali.

Anggaran itu untuk membiayai apa saja?

Makan minum dan transport. Ada juga biaya untuk membuat brosur dan itu dibagikan di puskesmas. Jadi pasa saat turun ke lapangan, kami juga melibatkan promkes puskesmas setempat. Karena kami paham bahwa ada keetrbatasan promkes di puskesmas.

Jadi kami merasa bahwa upaya yang dilakukan sangat luar biasa. Karena anggaran yang minim itu harus mampu menjangkau 136 desa dan terus terang itu belum bisa terpenuhi. Jadi kami maksimalkan saja dari anggaran yang ada yang penting ada untuk pembeli bensin.

Jadi isu apa yang teman-teman promkes saat bertemu dengan masyarakat?

Jadi masyarakat itu mengatakan bahwa jangan masuk rumah sakit. Kamu pasti dicovidkan karena danya di rumah sakit. Bukan di puskesmas. Jadi memang kepercayaan tentang covid itu memang kurang. Jadi kalau mereka sakit atau menunjukkan gejala, mereka tetap di rumah karena kalau ke rumah sakit psati akan dicovidkan. Begitu keyakinannya. Jadi memang pada akhirnya pesan-pesan diawal kami juga menekankan untuk menjaga imun dan perbaikan gizi. Sehingga setidaknya itu dapat memberikan proteksi ketahanan tubuh. Karena memang pada saat itu faktor cuaca juga yah. Bulan satu bulan dua, kalau kita kena flu itu terasa lebih berat. Bahkan kadang

sampai hilang penciuman. Banyak saya mendapatkan laporan seperti itu dimasyarakat. Makanya pada saat kita datang kita juga sampaikan agar rutin saja konsumsi herbal, jahe dan sereh itu bagus. Kami mendapat informasi itu juga dari pusat ya.

Jadi kapan tepatnya teman-teman promkes mulai turun ke lapangan terkait pemberian edukasi mengenai Covid 19?

Kami memulai itu ya tadi, akhir desember, pada saat momen liburan. Tapi puncaknya itu di Juni 2021 karena vaksin itu disitu. Jadi mulainya itu Maret sampai Juni. Jadi itulah kita banyak turun ke pasar-pasar. Karena kasus sedang tinggi. Dan kita juga tetap meyakinkan masyarakat untuk jangan juga takut, yang penting patuhi prokes dengan tetap memakai masker saat diluar rumah.

Seperti apa sih bu hambatan yang dirasakan saat melakukan penyuluhan di masyarakat?

Masyarakat itu sebenarnya kalau ada orang yang tidak percaya palingan dia cuma tidak mendengarkan, atau kemudian dia pergi, dan ketawa-ketawa. Trus ada masker tapi tidak dipake, hanya pada saat ada petugas saja. Jado saya bilang walaupun tidak percaya, tidak mau, tapi jangan memengaruhi orang. Karena ini adalah hal yang sangat penting yang harus diterapkan. Kalaupun dirinya tidak mau, tolong tetap disampaikan ke keluarga bahwa mencegah lebih baik dari mengobati. Jadi memang prokes itu sangat susah.

Jadi bisakah saya simpulkan kalau yang berperan untuk penyebarluasan informasi terkait Covid 19 ini adalah di bidang promkes?

Iya betul. Jadi kami adalah upaya preventif yang melakukan KIE. Kalau bidang lain P2 misalnya, itu bagian tracing dan vaksinator. Jadi kami memang harus turun bersama tim tracing untuk mengedukasi keluarganya. Karena kapan tidak seperti itu, bisa jadi akan dikucilkan, karena ketidakpahaman itu. Itulah yang sempat terjadi di Gantarang dan Bonto Bahari juga.

Kecamatan mana yang dirasa paling berat dalam upaya yang ibu lakukan?

Itu di Kindang, Borong Rappoa. Kalau ada kasus Covid, baru kita mau datang, disitu ada petugas yang dihadang dengan parang. Jadi kita juga tidak berani kesana, kita menelpon mau kesana kemudian dilarang. Katanya

jangan, jangan ada yang dari kota. Orang disitu saja tidak berani turun apalagi dari kota. Dia kira kalau orang Covid itu, sudah dikucilkan dari masyarakat. Kayak aib begitu.

Kemudian di kajang juga, ada beberapa yang tidak mau di swab dsb. Tapi kami tetap menjelaskan bahwa tidak selamanya dibawa ke rumah sakit. Kalau tidak bergejala bisa isolasi di rumah saja. Yang penting minum vitamin. Jadi memang perlu dijaga karena siapa tau ada lagi yang datang membesuk.

Saya sendiri sudah pernah kena. Tapi tidak bergejala. Jadi di rumah saja. Kebetulan keluarga memang tinggal di kampung. Saya ada di rumah di kota. Jadi saya disitu, dibelikan minyak kayu putih dan keperluan lain oleh suami. Jadi pengalaman saya yang pernah dinyatakan positif, juga membantu pada saat saya penyuluhan. Bahwa tidak perlu takut. Bisa sembuh, yang penting perbaiki gizi, olah raga.

Jadi saya sendiri merasakan pengalaman bagaimana keseharian saat menjalani isolasi. Terus terang saya tetap keluar. Beli sayur, ikan. Untuk makan yang ada persediaan habis. Tapi saya tetap pakai masker dan menghindari kontak langsung dengan orang. Tapi saya juga mendapat banyak perhatian ya. Ada yang datang membawakan makanan, ada yang membawakan minyak kayu putih. Support seperti itulah yang membuat kita tidak merasa sendirian.

Dari penugasan SK ini, ada tidak indikator keberhasilannya, apakah tidak ada target-target yang diberikan begitu?

Tidak ada. Cuma kita memang bisa melihat bahwa setelah kita melakukan penyuluhan tadi, maka tingkat pencapaian vaksin meningkat, termasuk pemeriksaan swab juga, dan penerapan prokes.

Ada berapa sebenarnya SDM Promkes?

Ada 5, jadi 6 dengan saya. Jadi fasilitas itu juga minim. 1 saja kendaraan kami punya untuk 10 kecamatan. Jadi kami buat jadwal, digilir. Kami juga masih merasa kesulitan saat melakukan penyuluhan. Karena masih manual. Artinya berbicara dengan menggunakan pengeras suara. Bukan main kalau setiap hari seperti itu ya. Tapi pernah suatu ketika kami bertemu dengan Kodim, yang juga melakukan penyuluhan. Tapi mereka memutar rekaman suara saja. Bagus sekali ada juga pakai bahasa daerah. Ternyata itu dibuat di SPL, Kominfo.

Jadi selama ini memang tidak tahu ya, artinya dalam melaksanakan tugas selaku promkes, tidak bekerjasama dengan instansi lain?

Iya tidak. Jadi kegiatan itu memang seolah-olah terburu-buru, saat menerima instruksi.

Baiklah. Terimakasih atas waktu yang diberikan kepada kami.

| | |
|-------------------|--|
| Nama | : dr. Amrullah |
| Pekerjaan/Jabatan | : Plt. Kepala Puskesmas Ujung Loe, Bulukumba |
| Hari/Tgl. | : Selasa, 25 Januari 2022 |
| Tempat | : Kantor Dinas Kesehatan, Bulukumba |

Bisa dijelaskan bagaimana tenaga kesehatan Puskesmas khususnya di Ujung Loe dalam melakukan edukasi mengenai Covid 19 ke masyarakat?

Itu dilakukan oleh yang membidangi promkes. Tapi dulu sempat bermasalah BOK nya. Namun hal itu tidak mengurangi semangat mereka untuk turun ke lapangan. Saya pernah bersama dan melihat langsung kegiatannya. Seperti sosialisasi di pasar, penyuluhan begitu di pasar. Kemudian melakukan edukasi kepada pasien-pasien Covid, termasuk keluarga pasien bersamaan dengan dilakukannya tracing. Supaya ada semangat, supaya mereka paham tentang Covid, dan melakukan proteksi diri. Seperti pakai masker, cuci tangan, jaga jarak.

Jadi petugas promkes itu fungsional ya. Rata-rata latar belakangnya dari sarjana kesehatan masyarakat. Itu kan memang ada beberapa jurusan ya. Ada epidemiologi, ada promkes, ada kesehatan lingkungan, ada gizi, ada admisnistrasi dan kebijakan kesehatan, ada manajemen rumah sakit. Jadi pada masa pandemic ini mereka dimaksimalkan untuk melakukan edukasi, baik dalam gedung maupun luar gedung. Edukasi luar gedung itu yang melakukan penyuluhan di pasar-pasar, menyebarkan pamflet-pamflet, kemudian melakukan edukasi kepada keluarga pasien covid, itu yang mereka lakukan.

Bisa dijelaskan metode edukasi dalam gedung pak?

Kalau dalam gedung, di ruang tunggu poli. Mereka pasang banner, mereka menyuluh pada orang-orang yang sementara menunggu antrian pelayanan dalam gedung. Disitulah mereka menyampaikan tentang Covid, tentang dampak covid, bahayanya seperti apa.

Yang ke lapangan juga mereka diikuti pada tim yang melakukan tracing. Jadi sambil dokter memeriksa mereka juga menyampaikan pada masyarakat yang didatangi. Kalau yang ke pasar-pasar mereka pakai Toa. Semua puskesmas melakukan hal itu. Ke sekolah-sekolah juga.

Apa memang ada arahan khusus tentang itu?

Inisiatif mereka yak arena ini pada momen pandemi. Dari inisiatif kemudian membuat perencanaan. Dari perencanaan itulah kemudian action di lapangan. Jadi dibuat memang jadwal-jadwal pelaksanaannya.

Jadi selain di pasar-pasar, saya juga ikut di sekolah-sekolah. SMA begitu. Utamanya tentang kewaspadaan dini. Proteksi begitu. Jadi penekanannya disitu.

Apakah dalam menyampaikan informasi pernah secara khusus ditujukan untuk menangkal isu-isu hoaks?

Yang jelas sudah termasuk menjelaskan tentang hoaks. Tentang jangan percaya mitos, dsb. Masuk semua itu. Karena kan memang di masyarakat berkembang begitu. Itulah mereka lakukan sekaligus untuk mengcounter, mengeliminir isu hoaks, mitos.

Jadi metode yang dilakukan dengan cara seperti apa saja, bisa dijelaskan?

Ada selebaran berupa brosur. Biasa juga mereka setelah habis penyuluhan pun mereka membagikan brosur. Siapa tau ada yang mau baca-baca. Jadi menurut saya menyampaikan secara langsung lebih efektif. Karena kan masyarakat kita simpang siur ini dia dapat. Sehingga perannya lah orang kesehatan yang mengclearkan itu. Memberikan masukan yang tepat. Jadi diantara bidang pekerjaan promkes itu ya baliho-baliho, banner, brosur. Termasuk juga yang edukasi langsung ke masyarakat.

Apa kendalanya?

Dana. Anggaran operasional untuk transportasinya, makan minumannya. Itu sangat minim. Termasuk juga honorinya. Jadi mereka itu ada yang PNS, ada

yang magang. Kalau di puskesmas ya. Gak semua PNS, tapi kepala PNS.

Jadi selama ini upaya yang dilakukan ya seperti itu, melakukan sosialisasi, menyampaikan informasi. Kami tidak punya instrument untuk mengukur sejauh mana masyarakat memahami atau menerima ya.

Baik Bapak, terimakasih atas keterangannya.

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan
Drs. H. M. Daud Kahal,
M.Si (Kadis Kominfo
Bulukumba) di Kantor
Diskominfo.



Wawancara dengan
Dr. Hj. Wahyuni AS.,
MARS (Kadis Kesehatan
Bulukumba) di Kantor
Dinkes.



Wawancara dengan Drs. K. H. Tjamiruddin, S. Pdi (Ketua MUI Bulukumba) di Kediannya Kel. Kasimpureng.



Wawancara dengan Nurisdah, SKM, M.Kes (Kasi Promkes Dinkes Bulukumba) di Kantor Dinkes.



Wawancara dengan Andi Ayatullah Ahmad (Kasubag Pemberitaan dan Kerjasama Pers) Di Kantor Bupati Bulukumba.



Wawancara dengan Sunarti Sain (Pemred Radar Selatan) di Kantor Harian Radar Selatan.



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Alamat : Jl. Kenari No.13 Telp. (0413) 85060 Bulukumba 92512

Bulukumba, 28 Desember 2021

Nomor : 0699/DPMPTSP/XII/2021
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. 1. Kepala OPD Lingkup Kab. Bulukumba
2. Tokoh Masyarakat Kab. Bulukumba
Masing - Masing
Di
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/1024/Kesbangpol/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :

Nama : SYARIFAH KUSUMADEWI KINANGGI
Nomor Pokok : E022191041
Program Studi : ILMU KOMUNIKASI
Institusi : UNHAS MAKASSAR
Alamat : JL. MATAHARI

Bermaksud melakukan Penelitian di OPD Lingkup Kabupaten Bulukumba dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Bulukumba dalam rangka **TESIS** dengan judul "**STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI MISINFORMASI DAN DISINFORMASI TERKAIT COVID 19 DI KABUPATEN BULUKUMBA**" yang akan berlangsung pada tanggal 22 Desember 2021 s/d 22 Februari 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat;
3. Penelitian/pengambilan data menyimpang dari izin yang diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksamplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan);
2. Kepala Kesbangpol Kab. Bulukumba di Bulukumba;
3. Arsip